



ASEAN  
INDONESIA  
2023



TANGGUH  
UNTUK  
INDONESIA



# LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



## KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Tahunan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2022 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja Tahun 2022 menyajikan capaian target kinerja tahun 2022, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 27 Februari 2023

Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	24
BAB IV PENUTUP .....	142

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama .....	4
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II .....	5
Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia .....	6
Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama.....	15
Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 .....	16
Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 .....	16
Gambar 9. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2022.....	25
Gambar 10. Rincian Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama.....	32
Gambar 11. Piagam Penghargaan Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP Kategori Pelayanan Prima .....	37
Gambar 12. Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB .....	37
Gambar 13. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur .....	48
Gambar 14. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022 .....	35
Gambar 15. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan oleh Sekretaris Utama .....	41
Gambar 16. Rincian Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama Tahun 2020-2021.....	47
Gambar 17. Urutan K/L Kategori Pagu Kecil yang Menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran TA 2021.....	51
Gambar 18. Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap BPOM Tahun Anggaran 2022 .....	58
Gambar 19. Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Media Tahun 2020-2022.....	59
Gambar 20. Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan Media Tahun 2021-2022 .....	59
Gambar 21. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022.....	64
Gambar 22. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 atas Penerapan Sistem Merit Kategori Sangat Baik .....	77
Gambar 23. Top 10 Meritokrasi ASN Tahun 2022.....	79
Gambar 24. Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 .....	101
Gambar 25. Realisasi indeks RB Settama tahun 2020-2022.....	107

Gambar 26. Perbandingan Nilai AKIP Settama dengan BPOM dan Unit Eselon I.....	114
Gambar 27. Perbandingan Nilai IP-ASN Settama dengan BPOM dan Unit Eselon I .....	117
Gambar 28. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Settama dan Unit Eselon I Lain Tahun 2020-2022 .....	123
Gambar 29. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Settama dan Unit Eselon I Lain Tahun 2020-2022 .....	125

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	18
Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama Per Program Tahun 2022 .....	20
Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022 .....	22
Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Strategis .....	22
Tabel 5. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Periode Renstra (2024) .....	22
Tabel 6. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2022.....	27
Tabel 7. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022.....	27
Tabel 8. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022.....	30
Tabel 9. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022.....	53
Tabel 10. Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Media BPOM Tahun 2022.....	58
Tabel 11. Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek Tahun 2020-2022 .....	62
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022.....	69
Tabel 13. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022.....	71
Tabel 14. Nilai Final Assessment Sistem Merit Tahun 2020-2022.....	71
Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022 .....	81
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022.....	85
Tabel 17. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022 .....	89
Tabel 18. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022 .....	97
Tabel 19. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022.....	104
Tabel 20. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022 .....	115
Tabel 21. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022.....	120
Tabel 22. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama.....	122
Tabel 23. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022 .....	124
Tabel 24. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022 .....	136
Tabel 25. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022.....	139

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 .....	145
Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024.....	147
Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022 .....	150
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022 .....	152
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 .....	158
Lampiran 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022.....	161
Lampiran 7. Capaian RAPK per Eselon II di Sekretariat Utama Tahun 2022 .....	161

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin Tahunan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja ke depan.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Pada tahun 2022, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, dilakukan pengukuran terhadap 26 (dua puluh enam) indikator karena 1 (satu) indikator lainnya masih menunggu nilai dari Kementerian Keuangan yaitu Indeks Pengelolaan Aset. Dari 26 indikator yang dilakukan pengukuran, sejumlah **19 (sembilan belas) indikator** tercapai dengan kriteria **“Memenuhi Ekspektasi” (100≤x≤120)** yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (101,42%); 2). Persentase kerja sama yang efektif (100,72%); 3) Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (100,00%); 4). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,30%), 5). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama (100,18%), 6). Persentase Advokasi Hukum yang Efektif (101,17%), 7) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 8). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (100,00%), 9) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (100,00%), 10). Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal (108,89%); 11). Indeks sistem merit (105,62%); 12). Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama (100,12%); 13). Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama (107,69%); 14) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi (108,15%); 15) Persentase unit

organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (100,00%); 16) Indeks opini publik BPOM (107,29); 17) Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (116,16%); 18) Indeks RB Sekretariat Utama (110,80%); dan 19) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (116,99%); serta **7 (tujuh) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ( $80 \leq x < 100$ )** yaitu: 1). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (98,92%); 2) Indeks kepuasan media (98,72%); 3). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (97,83%); 4) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (96,90%); 5) Nilai RB BPOM di Lingkup Settama (95,54%); 6) Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama (98,00%); dan 7) Nilai AKIP Settama (94,20%).

Dibandingkan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, terdapat 13 (tiga belas) indikator dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” ( $\geq 100\%$ ), dimana 8 (delapan) diantaranya capaiannya telah melebihi 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target 2024.

Pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Dilakukan pencadangan anggaran/automatic adjustment sebesar Rp 39.256.361.000,00 sehingga pagu akhir dikurangi pencadangan anggaran/automatic adjustment adalah Rp359.715.627.000,00. Adanya revisi pembukaan blokir pencadangan/automatic adjustment anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022 serta Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00. Sampai dengan tahun 2022, telah direalisasikan sebesar Rp365.812.917.814,00 (**98,60%**).

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM” yaitu sebesar 52,51%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Penyusunan rencana penarikan dana secara cermat sehingga Deviasi Halaman III DIPA dapat diminimalkan.
2. Perbaiki pelayanan internal Sekretariat Utama sehingga Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen dapat meningkat.

3. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
4. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di lingkup Sekretariat Utama.

**MILESTONE KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2022**

	
<p>BPOM masuk dalam nominasi Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 2022 untuk kategori Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) Perlindungan Anak</p>	<p>BPOM memperoleh penghargaan Anggakara Birawa atas prestasinya sebagai salah satu instansi dari dua Instansi Pemerintah (IP) yang masuk Kategori <i>Outstanding Achievement</i> pada Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4). Sebelumnya BPOM yang diwakili Biro Hukum dan Organisasi sebagai unit pengelola pengaduan pelayanan publik berhasil masuk dalam TOP 6 IP Kategori <i>Outstanding Achievement</i> tahun 2022</p>
	
<p>Penghargaan dari Ombudman sebagai Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 Tingkat Lembaga Pemerintah</p>	<p>Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly atas pencapaian BPOM dalam menerapkan Reformasi Hukum Tahun 2022</p>
	
<p>BPOM kembali berhasil meraih prestasi sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2022</p>	<p>Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2017-2022</p>

<p>dari Komisi Informasi Pusat (KIP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut</p>	
	
<p>BPOM mendapatkan BKN Award Tahun 2022 sebagai Peringkat 2 Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)</p>	<p>BPOM mendapatkan BKN Award Tahun 2022 sebagai Peringkat 1 Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja</p>
	
<p>Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 atas Penerapan Sistem Merit Kategori Sangat Baik</p>	<p>BPOM mendapatkan penilaian penerapan Sistem Merit oleh KASN pada tahun 2020 dengan kriteria sangat baik dengan nilai 364. Selanjutnya pada tahun 2022, berdasarkan hasil penilaian KASN, BPOM mendapatkan peningkatan nilai penerapan Sistem Merit sebesar 23,5 total nilai sementara menjadi 387,5 dengan indeks 0,94 yang telah ditetapkan melalui Keputusan KASN Nomor 25/KEP.KASN/C/VII/2022</p>



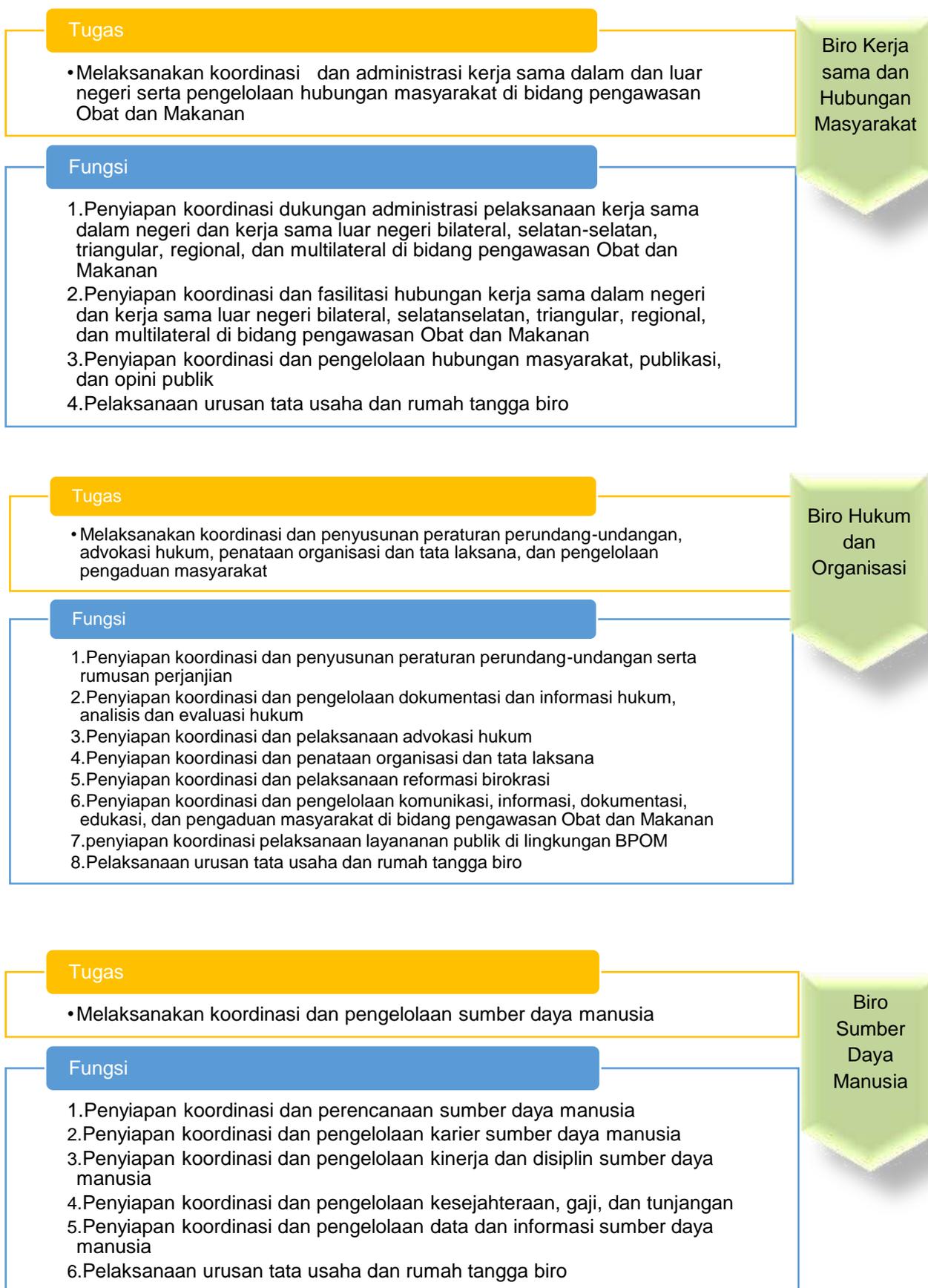
**BAB /****PENDAHULUAN****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:



## Tugas

- Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa, barang milik/kekayaan negara, kerumahtanggaan, arsip, serta protokol dan kesekretariatan pimpinan

Biro Umum

## Fungsi

- 1.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pengadaan barang/jasa
- 2.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara
- 3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga
- 4.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan persuratan dan kearsipan
- 5.Pelaksanaan urusan protokol dan kesekretariatan pimpinan
- 6.Pelaksanaan urusan tata usaha biro

## Tugas

- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan

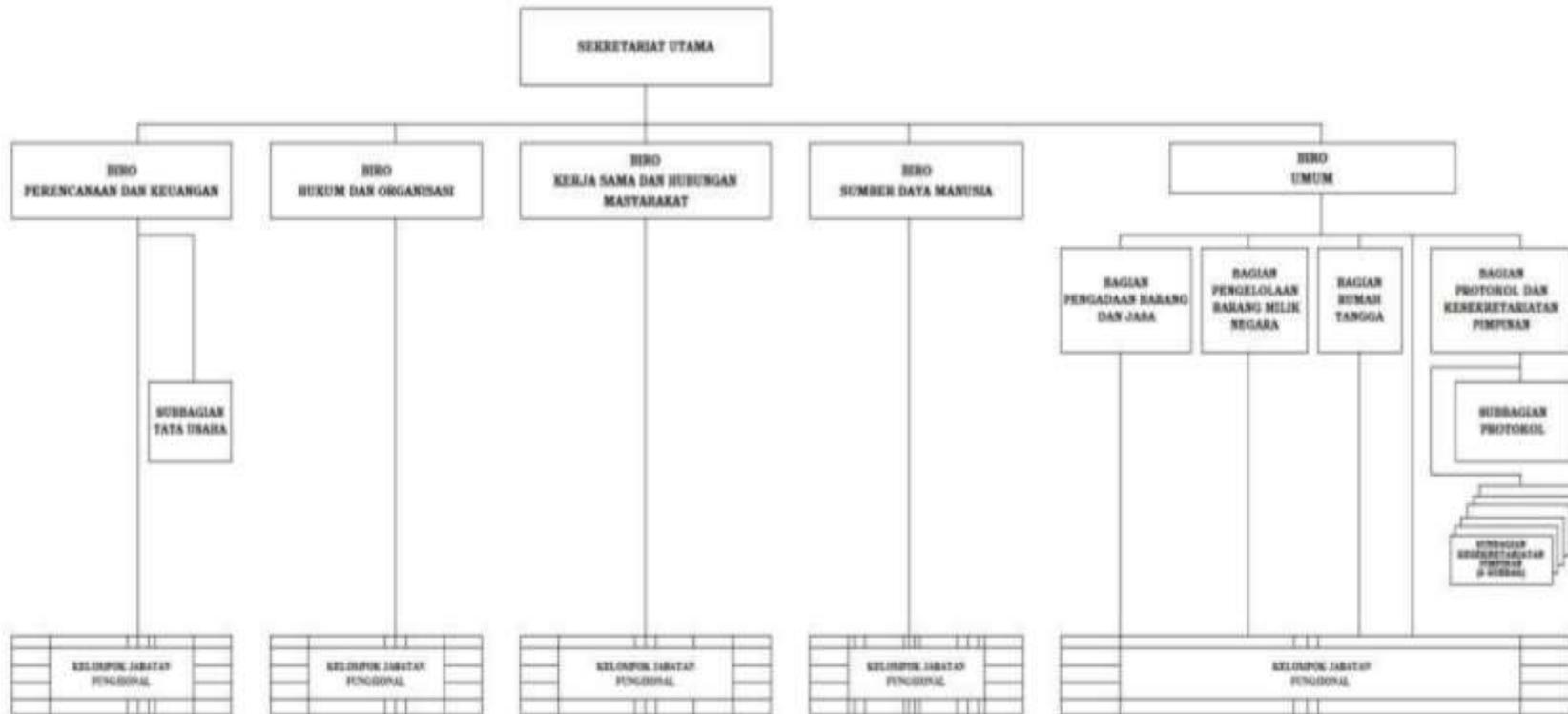
Biro  
Perencanaan  
dan  
Keuangan

## Fungsi

- 1.Penyiapan koordinasi penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM
- 2.Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara
- 3.Penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri
- 4.Penyiapan koordinasi dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan BPOM
- 5.Penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan
- 6.Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:





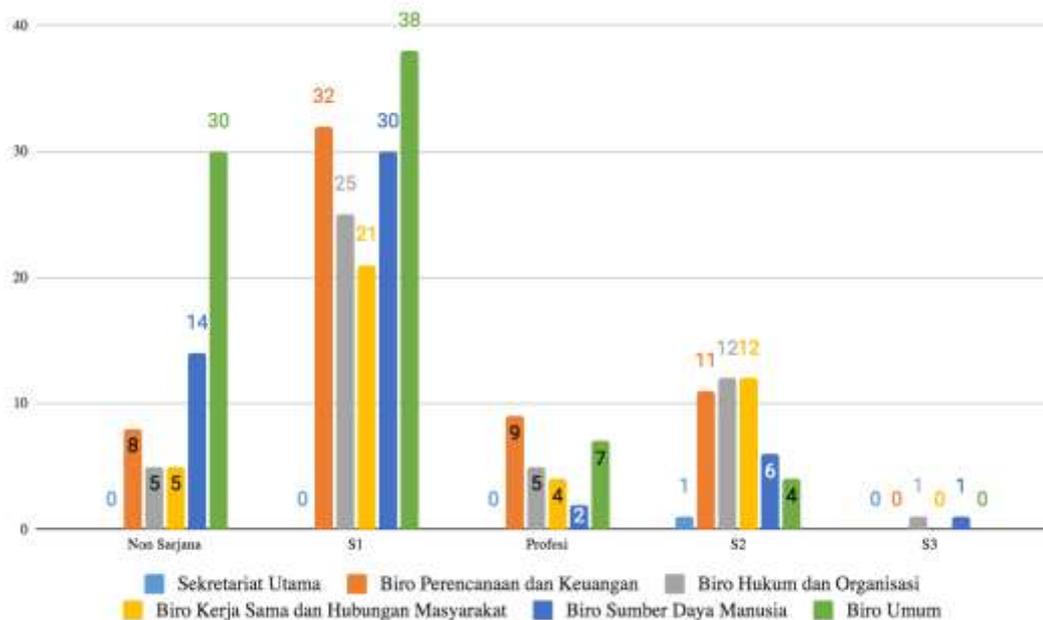
Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

## B. SUMBER DAYA MANUSIA

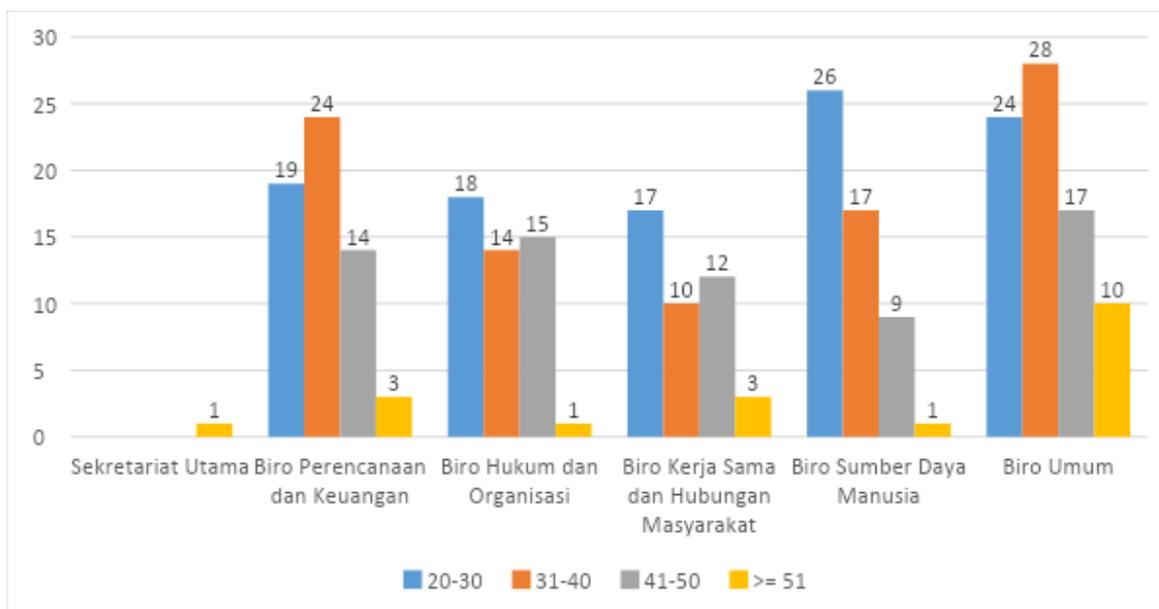
Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 283 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 571 orang (1 orang di Sekretariat Utama dan 570 orang di Biro-Biro). Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:



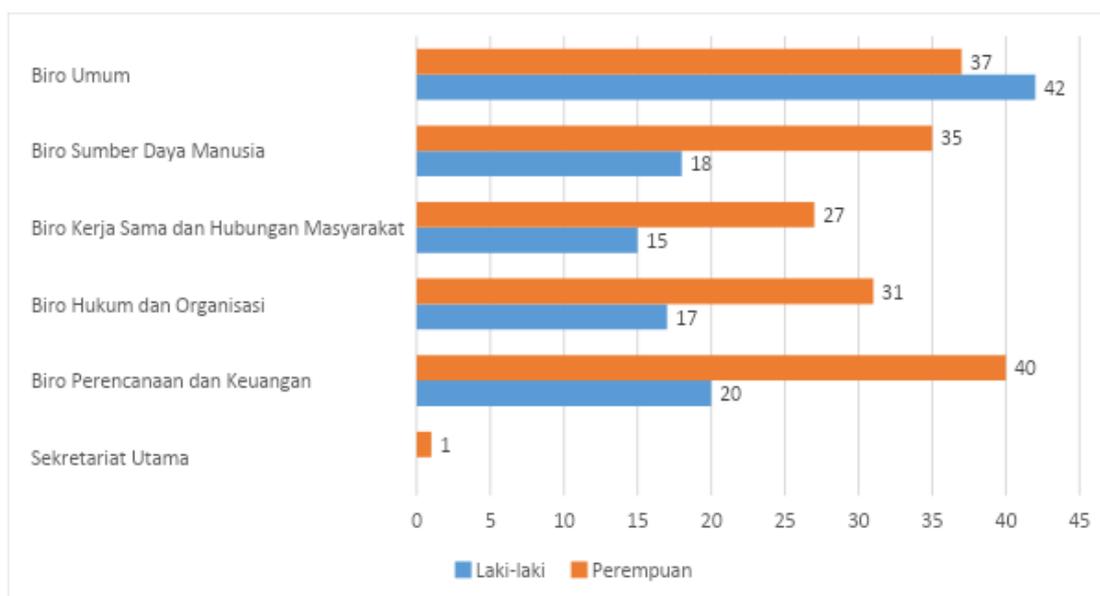
Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



**Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia**



**Gambar 5. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Jenis Kelamin**

Pada Tahun 2022, sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:



**Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja**

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 548 orang pegawai dengan komposisi pengangkatan pertama (152 orang), pengangkatan kembali (67 orang), perpindahan jabatan (10 orang), inpassing (122 orang), alih jenjang (12 orang), dan kenaikan jabatan (185 orang).

Mekanisme	Jumlah	Keterangan
Pengangkatan Pertama	152	PFM (11), Analisis Kepegawaian (27), Assesor SDM (6), Pranata Komputer (80), Psikolog Klinis (3), Analisis Kebijakan (9), Widyaiswara (7), Auditor (7), Pranata Humas (2)
Pengangkatan Kembali	67	PFM (60), Pranata Komputer (1), Arsiparis (2), Perencana (3), Auditor (1)
Perpindahan Jabatan	10	PFM (9), Perencana (1)
Inpassing	122	Analisis Kepegawaian (12), Pranata Komputer (11), Arsiparis (1), Analisis Kebijakan (2), Analisis Keuangan APBN (15), Pranata Keuangan APBN (67), Widyaiswara (1), Penata Laksana Barang (10), PPBJ (2), Analisis Hukum (1)
Alih Jenjang	12	PFM (11), Analisis Kepegawaian (1)
Kenaikan Jabatan	185	Periode Maret 2021 : PFM (107), PPBJ (1), Pranata Komputer (1), Analisis Kebijakan (1), Auditor (1) Periode September 2021 : PFM (71), Analisis Kepegawaian (1), Analisis Anggaran (1), Pranata Komputer (1)

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) pada bulan Desember 2022 dibandingkan dengan eksisting 2022:

No.	Unit Kerja	ABK	Eksisting	Gap	% Pemenuhan
1	Sekretaris Utama	1	1	0	100%
2	Biro Hukum dan Organisasi	130	49	81	38%
3	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	107	42	65	39%
4	Biro Perencanaan dan Keuangan	117	60	57	51%
5	Biro Sumber Daya Manusia	107	54	53	50%
6	Biro Umum	109	78	31	72%
<b>Total</b>		<b>571</b>	<b>284</b>	<b>287</b>	<b>49,74%</b>

### C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

#### 1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

## **2. Jejaring Kerjasama**

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

## **3. Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan

aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

#### **4. Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

#### **5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama**

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama

dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakkan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

#### **6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

#### **7. Sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

##### **1. Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di

Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan peran dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang tepat. Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19, kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, dan pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan flexible working arrangement (Work From Office dan Work From Home).

## **2. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)**

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

## **3. Penyederhanaan Birokrasi**

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

#### **4. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya**

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

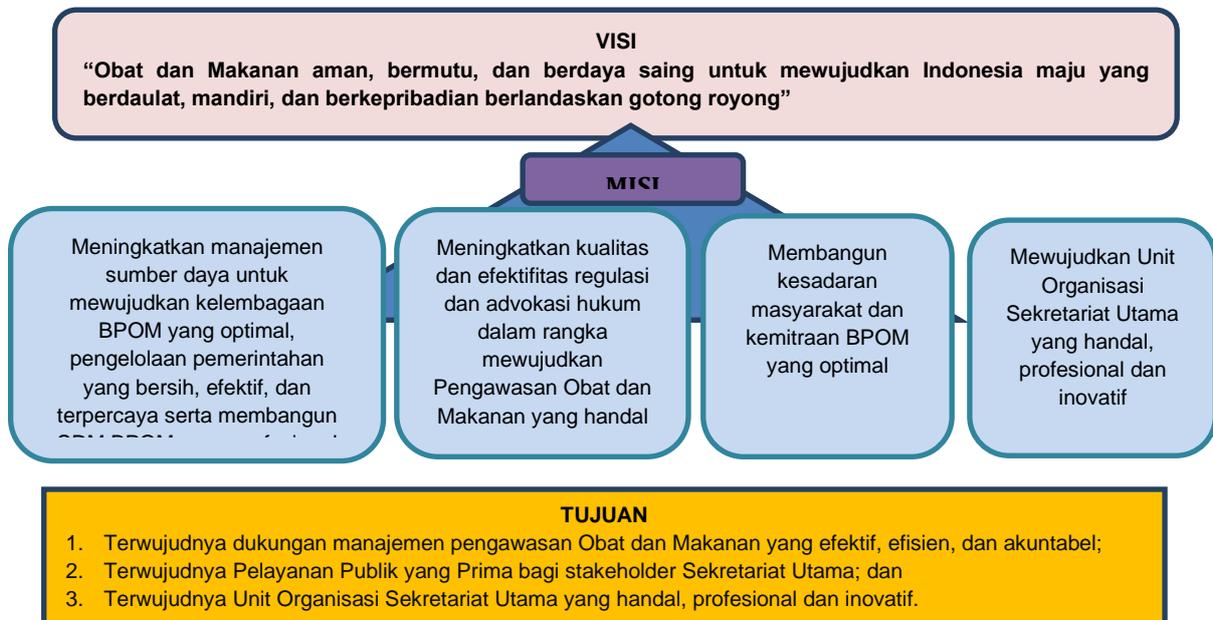
Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM,

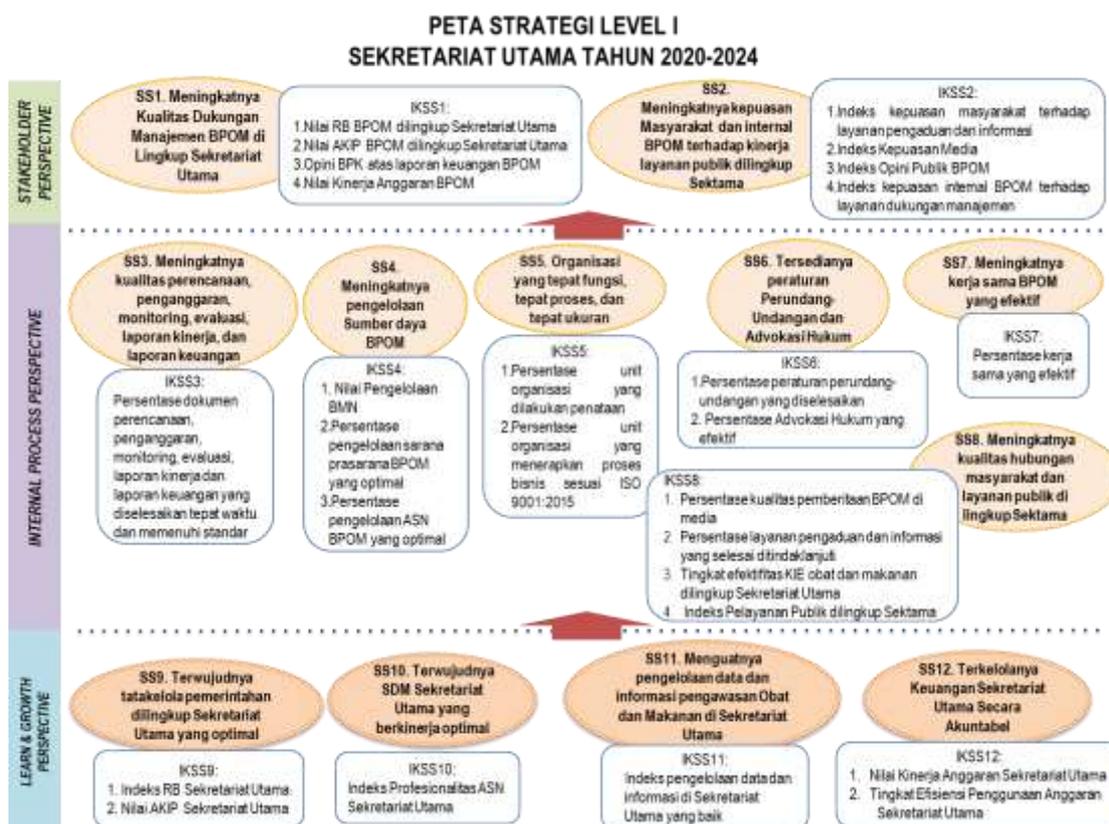
pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

**BAB //****PERENCANAAN KINERJA****I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan Kinerja di tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2021. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

**Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama**

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



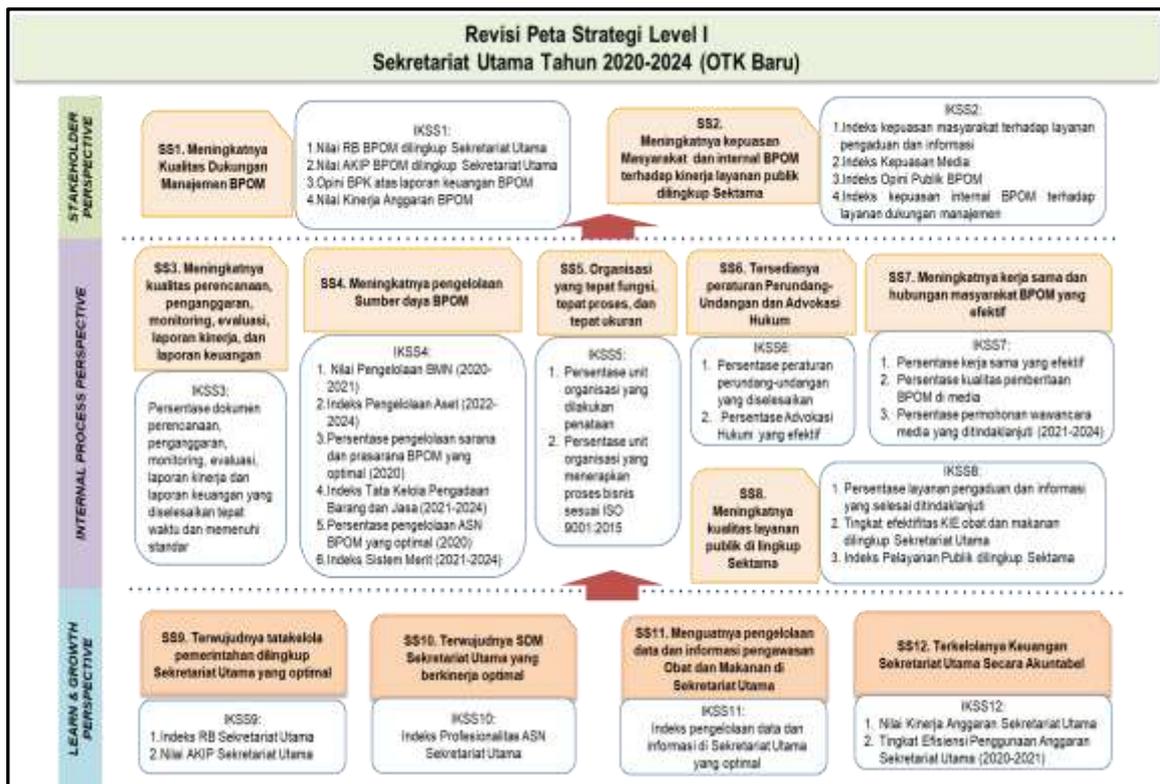
**Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021**

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
- Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:

- 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
  - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
  - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



**Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024**

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan

dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

## II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

### A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ditetapkan pada 3 Januari 2022. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Sasaran Program	Indikator	Target
<b>Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM</b>	1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
	2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
	3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
	4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
<b>Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama</b>	5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
	6. Indeks Kepuasan Media	74,5
	7. Indeks Opini Publik BPOM	79
	8. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
<b>Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan</b>	9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100

Sasaran Program	Indikator		Target
<b>Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM</b>	10.	Indeks Pengelolaan Aset	2,93
	11.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
	12.	Indeks Sistem Merit	0,89
<b>Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran</b>	13.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
	14.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
<b>Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum</b>	15.	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
	16.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75
<b>Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif</b>	17.	Persentase kerja sama yang efektif	86
	18.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
	19.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
<b>Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama</b>	20.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
	21.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
	22.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal</b>	23.	Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
	24.	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
<b>Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal</b>	25.	Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	80,6
<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama</b>	26.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2,25
<b>Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel</b>	27.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan

rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

## B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp398.971.988.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

**Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2022**

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen	398.971.988.000
	<b>Total</b>	<b>398.971.988.000</b>

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
- c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

**Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022**

Program/Sasaran Program	Pagu
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>378.684.282.000</b>
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	17.268.466.410
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	139.718.972.800
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9.433.216.790
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	184.022.308.900
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.482.777.000
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.570.509.000
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	8.194.503.000
8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	3.167.420.000
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	4.104.073.580
10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal	3.427.883.200
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.288.016.620
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.006.134.700

### III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut.

Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{\% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

**Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Strategis**

Status	Capaian Indikator	Keterangan	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum Memenuhi Ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak Memenuhi Ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Sumber: Pedoman SAKIP BPOM<sup>1</sup>

Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis pada tahun 2022 sehingga dilakukan penyesuaian terhadap kriteria capaian di tahun 2020 dan 2021. Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian realisasi tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 5. Kriteria Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Akhir Periode Renstra (2024)**

Notifikasi	Kriteria	Nilai
	Tercapai/Melampaui	$\geq 100\%$
	Akan Tercapai	$75\% \leq x < 100\%$
	Perlu Upaya Keras	$< 75\%$

<sup>1</sup> Mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir periode atau sudah mencapai target akhir periode atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir periode.

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA****I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA**

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kinerja selama tahun 2022. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

**1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM**

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Pengukuran capaian kinerja Settama tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Settama/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2022 sebesar 102,12%<sup>2</sup> dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Perhitungan NPSS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPS Total} = \{ \text{NPS Perspektif}_A + \text{NPS Perspektif}_B + \text{NPS Perspektif}_C \} / 3$$

**Tabel 6. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2022**

PERSPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
<b>A. Stakeholder Perspective</b>	<b>101,01</b>	<b>Memenuhi ekspektasi</b>
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	98,74	Belum memenuhi ekpsektasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	103,27	Memenuhi ekspektasi

<sup>2</sup> Aplikasi SIMETRIS menu e-perfromance tahun 2022

PERSPECTIVE / SASARAN PROGRAM	NPS	KRITERIA
<b>B. Internal Process Perspective</b>	<b>103,25</b>	<b>Memenuhi ekspektasi</b>
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	Memenuhi ekspektasi
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	111,30	Memenuhi ekspektasi
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	Memenuhi ekspektasi
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,59	Memenuhi ekspektasi
7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	104,91	Memenuhi ekspektasi
8. Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	102,71	Memenuhi ekspektasi
<b>C. Learning and Growth Perspective</b>	<b>102,10</b>	<b>Memenuhi ekspektasi</b>
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	102,50	Memenuhi ekspektasi
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	100,12	Memenuhi ekspektasi
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	108,89	Memenuhi ekspektasi
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	96,90	Belum memenuhi ekspektasi
<b>TOTAL NPSS</b>	<b>102,12</b>	<b>Memenuhi ekspektasi</b>



Sumber: Aplikasi SIMETRIS menu e-performance

Gambar 9. NPSS Sekretariat Utama Tahun 2022

Dari gambar di atas diketahui nilai capaian sasaran strategis dari 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) *Stakeholder* 101,01%; (2) *Internal Process* 103,25%; dan (3) *Learning and Growth* 102,10%. Rata-rata dari ketiga nilai capaian perspektif tersebut merupakan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Settama yaitu 102,12%.

Berdasarkan 27 indikator kinerja dari 12 sasaran strategis, 20 indikator dinyatakan “Memenuhi Ekspektasi” karena capaiannya diantara  $100\% \leq x < 120\%$  dari target, 6 indikator dinyatakan “Belum Memenuhi Ekspektasi” karena capaiannya diantara  $80\% \leq x < 100\%$ , dan 1 indikator belum dilakukan pengukuran karena masih menunggu nilai dari Kementerian Keuangan.

Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 7. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			CAPAIAN (%)					
			2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2024		
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	32,03	33,21	35,58	30,83	31,73	31,73 <sup>3</sup>	75,20	99,06	95,54	89,18	
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	72,44	73,33	75,14	70,67	71,86	71,86 <sup>4</sup>	96,48	99,20	98,00	95,63	
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00	100,00	100,00	100,00
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	93	93,5	95,6	95,37	93,98	94,83	102,55	101,05	101,42	99,19	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	87	88	90	85,3	93,38	95,17	107,30	107,33	108,15	105,74	
		6	Indeks Kepuasan Media	73	74	74,5	75,5	74,02	76,64	73,55	101,40	103,57	98,72	97,42	
		7	Indeks Opini Publik BPOM	66	78	79	81	79,6	82,55	84,76	120,61	105,83	107,29	104,64	
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,7	3,70	3,72	3,78	3,8	3,5	3,68	102,70	94,59	98,92	97,35	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,98	-	-	Menunggu nilai dari Kemkeu	-	-	-	-	
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	80	-	56	84,23	-	100,00	116,99	105,29	

<sup>3</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB<sup>4</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			CAPAIAN (%)					
		2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2024		
	12	Indeks Sistem Merit	-	0,88	0,89	0,9	-	0,88	0,94	-	100,00	105,62	104,44	
5	13	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
			Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015(%)	79	100	100	100	79	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
6	15	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Persentase Advokasi Hukum yang efektif(%)	82	95,5	95,75	96,5	94,63	95,97	96,88	115,40	100,49	101,17	100,39
7	17	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif (%)	82	84	86	90	91,67	88,76	86,62	111,79	105,67	100,72	96,24
			Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	99,59	99,82	99,84	99,86	99,84	99,82	97,68	100,25	100,00	97,83	97,81
			Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti(%)	-	65	66	68	-	65,91	76,67	-	101,40	116,16	112,75
8	20	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%)	99	99,2	99,4	99,8	99,47	99,44	99,70	100,47	100,24	100,30	99,90
			Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	96,32	92,52	94,37	98,19	91	93,71	94,54	94,48	101,29	100,18	96,28
			Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	3,91	4,51	4,55	4,65	4,48	4,59	4,90	114,58	101,77	107,69	105,38
9	23	Terwujudnya tatakelola pemerintahan	Indeks RB Sekretariat Utama	85	79,5	81,5	85,5	73,75	79,47	90,30	86,76	99,96	110,80	105,61

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET				REALISASI			CAPAIAN (%)			
				2020	2021	2022	2024	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2024
	dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	83	85,3	89,9	80,69	81,20	80,35	99,62	97,83	94,20	89,38
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79,6	80,6	82,6	77,37	81,05	80,70	99,19	101,82	100,12	97,70
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	1,51	2	2,25	3	0,2	1,20	2,45	13,25	60,00	108,89	81,67
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	93	93,6	94,8	91,47	88,75	90,70	98,35	95,43	96,90	95,68

## 1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

### Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM

#### IKU

1. *Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama*
3. *Opini BPK atas laporan keuangan BPOM*
4. *Nilai Kinerja Anggaran BPOM*

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

**Tabel 8. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024		
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria	
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	30,83	31,73	33,21	31,73 <sup>5</sup>	95,54	Belum memenuhi ekspektasi	89,18		
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	70,67	71,86	73,33	71,86 <sup>6</sup>	98,00	Belum memenuhi ekspektasi	95,63		
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00		
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	93,5	94,83	101,42	Memenuhi ekspektasi	99,19		
<b>Capaian SS 1</b>				<b>98,74</b>			Belum memenuhi ekspektasi			

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**” tahun 2022 adalah 98,74% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Dengan demikian, sasaran strategis belum tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, serta anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis. Hal ini disebabkan 2 (dua) dari 4 (empat) indikator masih menggunakan realisasi tahun 2021 karena masih menunggu nilai dari Kementerian PAN dan RB, yaitu Nilai RB BPOM dan Nilai AKIP BPOM di lingkup Settama.

<sup>5</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB

<sup>6</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB

### 1.1. “NILAI RB BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA”

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	35,58	30,83	31,73	33,21	31,73 <sup>7</sup>	95,54	Belum memenuhi ekspektasi	89,18	

Realisasi indikator “Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama” tahun 2022 masih menunggu nilai dari hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Apabila menggunakan realisasi tahun 2021 yaitu 31,73, maka capaian indikator adalah 95,54% dari target tahun 2022 sebesar 33,21. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 30,83, terdapat peningkatan sebesar 2,92% pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 35,58, maka capaian indikator adalah 89,18% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Presiden dan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, penilaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama mencakup Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (area) area perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (7,5%); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Cara perhitungan indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama adalah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB dengan menggunakan instrumen yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB yaitu pada komponen pengungkit untuk aspek pemenuhan dan aspek reform. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB tahun 2021, Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama adalah 30,83 dengan rincian sebagai berikut:

<sup>7</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB

Penilaian		Bobot	Indeks RB 2021
<b>A. PENGUNGKIT</b>			
I.	PEMENUHAN (20)	20.00	18.37
2	DEREGULASI KEBUJAKAN	2.00	1.97
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	3.00	2.93
4	PENATAAN TATALAKSANA	2.50	1.86
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM	3.00	2.89
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50	2.19
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50	2.28
II.			
III.	REFORM (30)	30.00	23.70
2	DEREGULASI KEBUJAKAN	3.00	2.15
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4.50	4.41
4	PENATAAN TATALAKSANA	3.75	3.02
5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SOM	4.50	2.76
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3.75	1.88
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75	3.39
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>60.00</b>	<b>49.98</b>

Gambar 10. Rincian Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama

Indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama Tahun 2022 merupakan indikator lanjutan tahun 2020-2021, akan tetapi terdapat perbedaan definisi operasionalnya, yaitu Komponen pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2020 menjadi capaian indikator Nilai RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, sedangkan pada tahun 2021, menjadi capaian indikator Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama.

Pada Tahun 2021, telah dilakukan reviu terhadap target Nilai RB BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya perubahan skema penilaian Indeks RB dari KemenPAN RB dimana terdapat penambahan penilaian aspek hasil antara (10%) dan aspek reform (30%) pada komponen pengungkit diluar aspek pemenuhan (20%).

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

### 1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

- Telah ditetapkan 35 (tiga puluh lima) Peraturan Badan POM, 127 (seratus dua puluh tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, dan 84 (delapan puluh empat) Rumusan Perjanjian.
- Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan.
- 2) RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 3) RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- 4) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
- b. menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.

Rencana tindak lanjut:

- a. Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian; dan
- b. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

## 2. Penataan dan Penguatan Organisasi

### a. Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

#### 1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. BPOM mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM kepada Kementerian PANRB dan telah dilakukan audiensi dengan pembahasan pada tanggal 21 Juni 2022.

Berdasarkan hasil pembahasan usulan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM dengan Kementerian PANRB tanggal 4 Februari 2022, telah disampaikan Surat Plt. Sekretaris Utama kepada Kementerian PANRB Nomor B-OT.01.02.2.22.02.22.175 tanggal 25 Februari 2022 hal Penyampaian Tindak Lanjut Pembahasan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM. Persetujuan terhadap Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kriteria klasifikasi yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

Kendala: penjadwalan diskusi dengan Kementerian PAN -RB yang membutuhkan waktu.

Rencana Tindak Lanjut: melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.

#### 2) Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah

kerja UPT dan evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam penataan kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui:

- a. Peningkatan klasifikasi UPT, pada:
  - i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan
  - ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM.
- b. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu: semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- c. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu:
  - i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan
  - ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Usulan perpindahan lokasi kantor UPT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Kementerian PANRB dan diundangkan serta ditetapkan pada Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kendala: Peningkatan klasifikasi UPT sangat bergantung dengan Rancangan Kriteria Klasifikasi yang masih dalam pembahasan dengan Kemen PAN-RB.

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.

#### b. Evaluasi Kelembagaan BPOM

Menindaklanjuti evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2021, BPOM mengusulkan adanya penataan organisasi dan tata kerja BPOM dan telah mendapatkan persetujuan prinsip dari penataan OTK BPOM dari Kementerian PANRB melalui Surat Menteri PANRB Nomor B/363/M.KT.01/2022 tanggal 18 April 2022 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil persetujuannya adalah sebagai berikut:

- a. perubahan nomenklatur Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan menjadi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan;
- b. pemisahan satu unit Eselon III Bagian Pengadaan dan BMN menjadi dua unit Eselon III yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara di Biro Umum;
- c. penambahan fungsi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik; dan
- d. penyesuaian fungsi pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Inspektorat I, dan Inspektorat II.

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM telah ditetapkan pada Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dan telah disampaikan kepada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan BPOM.

c. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM telah mengusulkan 3 UPP sebagai lokus penilaian evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku oleh Kementerian PANRB Pembina Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup Kementerian/Lembaga Tahun 2022, pilihan UPP sesuai skala prioritas adalah sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Yogyakarta.
- b. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- c. Balai Besar POM di Surabaya.

Berdasarkan usulan tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta dipilih sebagai lokus evaluasi oleh Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada tanggal 5 September secara daring. Dalam Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan RB pada 6 Desember 2022 Balai Besar POM di Yogyakarta memperoleh penghargaan kategori "Pelayanan Prima" dengan Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,56.



Gambar 11. Piagam Penghargaan Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai UPP Kategori Pelayanan Prima

- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1  
Koordinasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM dan 4 (empat) unit Deputi tahun 2022 oleh Kementerian PANRB yang diselenggarakan secara virtual tanggal 19 s.d. 20 September 2022.



Gambar 12. Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB

### 3. Penataan tatalaksana

- a. Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM

Awareness QMS ISO 9001:2015 merupakan kegiatan berkelanjutan BPOM untuk peningkatan kompetensi personil dalam rangka penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi untuk seluruh Manajer Representatif untuk seluruh Unit Kerja Pusat,

Balai Besar/Balai dan Loka POM, dilaksanakan awareness QMS terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif Unit Kerja Pusat pada 12 Mei 2022 di Bekasi. Terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur, awareness telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Balai Besar POM Makassar. Kegiatan Awareness QMS untuk perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Tengah diselenggarakan tanggal 30 Mei 2022 di Balai Besar POM Semarang. Kegiatan Awareness QMS yang dihadiri perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Barat berlangsung tanggal 3 Juni 2022 di Balai Besar POM Padang.



Gambar 13. Pelaksanaan awareness QMS terhadap UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur

b. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM tahun 2022 dilakukan untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja yang terdiri dari pelaksanaan sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan pada 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang terdiri atas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan pada 3 (tiga) UPT BPOM yang terdiri atas Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan Loka POM di Kabupaten Ende sementara untuk surveilan dilakukan pada 99 (sembilan puluh sembilan) Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak

BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan ISO 9001:2015 terhadap 104 (seratus empat) Unit Kerja. Untuk pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM telah selesai dilakukan pada tanggal 23 September 2022 dan kegiatan exit meeting pada tanggal 11 Oktober 2022. Exit meeting dihadiri oleh Deputi Manajemen Puncak BPOM, seluruh Kepala Unit Kerja, Tim Koordinator Manajemen Representatif, Tim Koordinator Auditor Internal, Lead Auditor PT Sucofindo serta Perwakilan Manajemen Representatif Unit Kerja BPOM secara daring melalui zoom meeting. Pada pertemuan exit meeting, Penyedia jasa konsultansi ISO 9001:2015 dari PT Sucofindo menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 tahun 2022 dengan perolehan sertifikat/surat rekomendasi ISO 9001:2015 untuk 104 (seratus dua) unit organisasi yang terdiri dari Manajemen Puncak BPOM, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 34 (tiga puluh empat) Balai Besar/Balai POM dan 39 (tiga puluh sembilan) Loka POM di Kabupaten/Kota.



Gambar 14. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022

c. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2021/2022 oleh BPKP

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Kegiatan evaluasi Desk Evaluasi SPIP-T BPOM dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2022 oleh tim evaluator BPKP terhadap 6 (enam) Unit Kerja yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja BPOM. Kegiatan meliputi konfirmasi atas pengisian Kertas Kerja SPIP-T, pendalaman informasi mengenai kebijakan dan implementasi yang berlaku, tugas dan fungsi Unit Kerja, proses bisnis yang berlaku, dan penambahan data dukung yang diperlukan pada kertas kerja SPIP-T.

d. Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Nasional BPOM tanggal 8 s.d. 9 November 2022 di Jakarta yang diadakan *back to back* dengan Tinjauan Manajemen BPOM ISO 9001:2015. Penyelenggaraan Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 BPOM merupakan evaluasi atas penerapan QMS BPOM yang dilaksanakan secara periodik untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas yang berkelanjutan. Berdasarkan klausul ISO 9001:2015 9.3 Management Review, Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen mutu organisasi, pada selang waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategis organisasi.

Evaluasi pelaksanaan QMS BPOM tahun 2022 telah dilakukan melalui audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan tanggal 20 April s.d. 8 Juni 2022 pada Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di bawah koordinasi Inspektorat II selaku Koordinator Auditor

Internal dengan mengintegrasikan persyaratan Standar ISO 9001:2015, SPIP, RB Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016 khusus untuk laboratorium baku pembanding Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional sebagai Produsen Bahan Acuan, dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ISO 45001:2018. Audit Eksternal dilakukan tanggal 19 Juli s.d. 23 September 2022 oleh penyedia eksternal PT Sucofindo terhadap 104 (seratus empat) Unit Organisasi. Berdasarkan hasil closing-meeting oleh PT Sucofindo pada tanggal 11 Oktober 2022 seluruh Unit Kerja direkomendasikan untuk memperoleh sertifikat ISO 9001:2015.

Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama selaku Deputy Manajemen Puncak menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.



Gambar 15. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara simbolis kepada Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan oleh Sekretaris Utama

e. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Subsite QMS BPOM

Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan subsite QMS untuk penambahan fitur jumlah pengunjung subsite, penambahan fitur FAQ, dan pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite QMS.

Penambahan fitur jumlah pengunjung subsite QMS akan memuat pengunjung per hari, per bulan, per tahun, umur yang mengakses, dari mana asal pengunjung yang masuk, jenis kelamin pengunjung dan lain-lain. Penambahan

fitur jumlah pengunjung subsite dapat menggunakan google analytics. Penambahan fitur FAQ pada subsite QMS dapat berupa daftar pertanyaan dengan dilengkapi daftar jawaban yang sering ditanyakan oleh pengguna subsite QMS. Pemanfaatan server development untuk pengembangan subsite QMS ketika ada perubahan yang kemungkinan menyebabkan masalah maka perubahan dilakukan terlebih dahulu di server development. Pengembangan subsite QMS dijadwalkan selesai pada Triwulan I tahun 2023 dan dapat diterapkan pada Triwulan II tahun 2023.

- f. Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 Sistem Manajemen Laboratorium dan SNI ISO/IEC 17043:2010 merupakan persyaratan umum Uji Profisiensi pada Laboratorium. Finalisasi Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 dan SNI ISO/IEC 17043:2010 dilakukan untuk persiapan akreditasi Laboratorium Digital Forensik Obat dan Makanan serta menyelaraskan dokumen Manual Organisasi Integrasi BPOM dengan pemenuhan persyaratan dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 Persyaratan Umum Uji Profisiensi pada Laboratorium di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Pembahasan finalisasi Manual Organisasi Integrasi dilaksanakan pada 19 Desember 2022 secara daring dan melibatkan Inspektorat II, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Direktorat Siber Obat dan Makanan, dan Biro Hukum dan Organisasi. Hasil pembahasan adalah penyesuaian narasi pada butir-butir Manual Organisasi Integrasi untuk mengakomodasi persiapan akreditasi Laboratorium Digital Forensik Obat dan Makanan dan menyelaraskan dengan pemenuhan persyaratan dokumen akreditasi SNI ISO/IEC 17043:2010 pada Laboratorium di Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

#### **4. Penataan Sistem Manajemen SDM**

- a. Terlaksana pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Menpan, pembahasan jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, Pengusulan evjab JF Perencana Utama, Analis kebijakan Utama, Arsiparis Utama, Auditor Pertama sd Utama, dan jabatan pelaksana. Akan proses revisi PerBPOM menunggu rekomendasi persetujuan evjab dari Menpan.
- b. Terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reuiu ke unit

- kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN. Terlaksana Desk penyusunan ABK pusat dan UPT.
- c. Benchmark Biro SDM, Hukum dan Organisasi Menpan terkait pengadaan CPPPK untuk menjadi masukan dalam pembuatan pedoman pengadaan CPPPK. Telah dilakukan desk data PPNPN untuk dilakukan mapping bagi PPNPN yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPPPK.
  - d. Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama plt Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis.
  - e. Penerbitan SE Pengelolaan Kinerja, Perencanaan Kinerja Pilot Project (Surabaya dan Jambi), telah dilaksanakannya sosialisasi penilaian/konversi SKP 2021, sosialisasi penilaian kinerja JPT, sosialisasi penilaian kinerja pegawai tugas belajar, sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja dan aplikasi SIMAKIN BPOM serta Monev Kinerja TW IV tahun 2021 dan TW I-III tahun 2022.
  - f. Telah terbit Perbadan POM Nomor 29 Tahun 2022 tentang jabatan dan kelas jabatan di Lingkungan Badan POM
  - g. Sosialisasi ke unit kerja terkait IKU Penyusunan Kebutuhan SDM yang Baik, dan Penilaian Perencanaan Kebutuhan seluruh unit kerja dari penyampaian melalui aplikasi SirenSDM
  - h. Telah tersedia dokumen Pengadaan yaitu SK Pedoman Pengadaan PPPK, SK Pansel Pengadaan PPPK, SK Petunjuk Teknis Seleksi Administrasi PPPK, Pengumuman PPPK, Jadwal pelaksanaan Seleksi Administrasi
  - i. Telah dilakukan sosialisasi penilaian kinerja tahunan dan penilaian SKP pegawai TUBEL, pejabat fungsional dan administrasi melalui aplikasi SIMAKIN BPOM.
  - j. Terlaksana 6 kali rapat Komdis, 3 kali rapat pembahasan permasalahan pegawai dan terlaksana pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin/kode etik & kode perilaku ke Polres Cirebon dan BBPOM di Makassar dan BBPOM di Surabaya.
  - k. Telah dilakukan FGD Internal perihal penyusunan roadmap implementasi Kode Etik dan Kode Perilaku tanggal 17 November dan 7 Desember 2022 dengan unit kerja terkait dan AoC.

Kendala/hambatan: -

Rencana Tindak lanjut:

- a. Masih menunggu terbit rekomendasi menpan usulan evjab JF Widyaiswara, Perancang UU.
- b. Akan membuat feedback dari hasil penilaian kepada unit kerja yang mendapatkan nilai rendah (ada kesalahan) dalam penyusunan perencanaan kebutuhan.
- c. Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan seleksi kompetensi pada tahun 2023
- d. Penjadwalan pemeriksaan kasus Makassar
- e. Pembahasan hasil pemeriksaan pegawai BBPOM Pontianak, Banjarmasin
- f. Akan dilakukan pembahasan mengenai rancangan pengembangan aplikasi kepegawaian untuk awal tahun 2023, dan menyusun skla prioritas pengerjaan aplikasi.

## **5. Penguatan Akuntabilitas**

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Finalisasi grand design pengawasan Obat dan Makanan.
- c. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- d. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I, II, III tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- h. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021, triwulan I, II, III tahun 2022.
- i. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka triwulan I, II, III tahun 2022.
- j. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- k. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.

- l. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.
- m. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- n. Penerbitan PerBPOM tentang revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM dan revisi Pedoman Monev dan Pelaporan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM.

## **6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama di triwulan I0056 tahun 2022 yaitu:
  - i) Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Utama.
  - ii) Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
  - iii) Review Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Utama.
  - iv) Implementasi Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai Standar.
  - v) Pelaksanaan pelayanan publik tatap muka di lingkungan Sekretariat Utama.
  - vi) Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPIONI BPOM) dalam rangka budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama.
  - vii) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan Pelaksanaan pelayanan.
  - viii) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan HaloBPOM.
  - ix) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- c. Pelaksanaan monev rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan.

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama masih perlu ditingkatkan.

Rencana tindak lanjut: melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama

## 1.2. NILAI AKIP BPOM DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	75,14	70,67	71,86	73,33	71,86 <sup>8</sup>	98,00	Belum memenuhi ekspektasi	95,63	

Realisasi indikator “Nilai AKIP di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2022 masih menunggu nilai dari hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Apabila menggunakan realisasi tahun 2021 yaitu 71,86, maka capaian indikator adalah 98,00% dari target tahun 2022 sebesar 73,33. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 70,67, terdapat peningkatan sebesar 1,68% pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 75,14, maka capaian indikator adalah 95,63% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Indikator Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama merupakan indikator lanjutan tahun 2020-2021. Pada Tahun 2021, telah dilakukan revaluasi terhadap target Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama berdasarkan peta strategi terbaru dengan memperhatikan baseline berdasarkan realisasi terhadap target kinerja Tahun 2020. Terdapat penurunan target target tahun 2021-2024 yang disebabkan adanya penyesuaian kembali target terhadap trend kenaikan per tahun Nilai AKIP.

Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB berdasarkan PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

<sup>8</sup> Nilai 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%).
4. Capaian Kinerja dengan bobot 20%, meliputi: Kinerja yang dilaporkan (output) (5%), Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%), Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,10	23,80
b.	Pengukuran Kinerja	25	19,94	20,04
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,14	12,28
e.	Capaian Kinerja	20	15,49	15,74

Gambar 16. Rincian Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama Tahun 2020-2021<sup>9</sup>

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- e. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.

<sup>9</sup> Surat Menteri PANRB Nomor B/89/M.AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 tentang Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2021

- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan IV Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- g. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- h. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka Triwulan I, II, III tahun 2022.
- i. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- j. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- k. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited
- l. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- m. Rakorpim Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2045.
- n. Pertemuan Evaluasi kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 dengan Pimpinan BPOM.
- o. Bimbingan Teknis dan Monev Online.
- p. Revisi Pedoman SAKIP bersama dengan Inspektort Utama.

### 1.3. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	

Realisasi indikator “Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM” tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai 4 dari target WTP sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). BPOM memperoleh predikat WTP selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak tahun 2014-2021. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) yaitu WTP, maka realisasi tahun 2022 telah mencapai 100,00% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). BPOM akan terus berupaya mempertahankan opini WTP untuk ke depan.

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan, Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama secara daring dan luring untuk LK Unaudited, Audited TA 2021, dan Semester I Tahun 2022.
2. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI.
3. FGD Penyusunan Laporan Keuangan.
4. Workshop Pengelolaan Kas Negara.
5. Pelaksanaan Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Satker).
6. FGD Pembentukan UAPPAW.
7. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Peraturan BPOM terkait pencabutan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNBP Fungsional di lingkungan BPOM dan Keputusan BPOM tentang Juklak Pengelolaan PNBP di lingkungan BPOM. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
8. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
9. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

#### 1.4. NILAI KINERJA ANGGARAN BPOM

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,37	93,98	93,5	94,83	101,42	Memenuhi ekspektasi	99,19	

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran BPOM” tahun 2022 adalah 94,83 dari target sebesar 93,50, sehingga capaian indikator adalah 101,42% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 yaitu 95,37, terdapat penurunan sebesar -0,57%. Hal ini disebabkan beberapa Rincian Output (RO) dan indikator Sasaran Strategis (SS) tidak tercapai 100%. Sebagai informasi, bobot pencapaian SS (aspek manfaat) adalah 50% terhadap nilai EKA dan 50% lainnya disumbang oleh rata-rata nilai EKA Eselon I. Selain itu, serapan anggaran tahun 2022 lebih besar dari tahun 2020, sehingga menurunkan nilai efisiensi pada Nilai EKA. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 93,98, terdapat peningkatan sebesar 0,90%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan kepatuhan Satker untuk memenuhi peraturan terkait pelaksanaan anggaran serta telah melaporkan kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 95,6, capaian indikator adalah 99,19% dengan kriteria “Akan Tercapai” (kuning).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (93,63 \times 60\%) + (96,63 \times 40\%) \\ &= 94,83\end{aligned}$$

Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 93,63, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 96,63, sehingga nilai kinerja anggaran adalah 94,83 atau 101,42% dari target tahun 2022 sebesar 93,50.

NKA tahun 2022 belum secara resmi disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Namun apabila menggunakan nilai tahun 2021<sup>10</sup>, perbandingan NKA BPOM dengan K/L lain dengan kategori Pagu Kecil sebagai berikut:

NO.	BA/ KODE K/L	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Nilai Kinerja Anggaran
21.	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	94,28
22.	114	SEKRETARIAT KABINET	94,24
23.	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	93,98
24.	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	93,92
25.	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	93,86
26.	087	ARHIF NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93,85
27.	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	93,61
28.	123	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	93,54
29.	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	93,25
30.	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	93,19
31.	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	93,18
32.	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	92,85
33.	119	BADAN KEAMANAN LAUT	92,79
34.	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	92,65
35.	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	92,61
36.	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	92,53
37.	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	92,53
38.	104	BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	91,85
39.	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	90,77

Gambar 17. Urutan K/L Kategori Pagu Kecil yang Menerima Penghargaan atas Kinerja Anggaran TA 2021

<sup>10</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan K/L yang Diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran K/L TA 2021

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, BPOM berada di posisi ke-23 dari 39 K/L dengan Pagu Kecil yang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan. Penghargaan diberikan untuk K/L dengan NKA >90 (katgeori Sangat Baik).

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penerapan *reward* dan *punishment* dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
- b. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan IV tahun 2022 pada SMART DJA.
- d. Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
- e. Menyusun laporan monev realisasi anggaran dan NKA per bulan.

Upaya peningkatan pada tahun 2022 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SMART DJA dan aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.
- b. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran.
- c. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target per jenis belanja dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal.
- d. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- e. Memperhatikan norma waktu pertanggungjawaban keuangan.
- f. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk penyelesaian kewajiban satker ke KPPN.

**Sasaran 2** **Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**

**IKU**

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**
2. **Indeks Kepuasan Media**
3. **Indeks Opini Publik BPOM**
4. **Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen**

**Tabel 9. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	88	95,17	108,15	Memenuhi ekspektasi	105,74	
Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	74,5	73,55	98,72	Belum memenuhi ekspektasi	97,42	
Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	79	84,76	107,29	Memenuhi ekspektasi	104,64	
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,72	3,68	98,92	Belum memenuhi ekspektasi	97,35	
<b>Capaian SS 2</b>				<b>103,27</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**” tahun 2022 adalah 103,27% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategis berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

## 2.1. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	90	85,3	93,38	88	95,17	108,15	Memenuhi ekspektasi	105,74	

Realisasi indikator “Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi” tahun 2022 yaitu 95,17 dari target 88 sehingga capaian indikator adalah 108,15% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 85,3, terdapat peningkatan sebesar 11,57%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,38, terdapat peningkatan sebesar 1,92%. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 90, capaian indikator adalah 105,74% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2023-2024.

Berikut perbandingan nilai per unsur layanan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi tahun 2019 - 2021.

Unsur Pelayanan		2020	2021	2022	Selisih
<b>U1</b>	Persyaratan Pelayanan	84,27	92,98	94,2	↑ 1,22
<b>U2</b>	Sistem/Mekanisme/Prosedur Pelayanan	84,08	93,07	93,73	↑ 0,66
<b>U3</b>	Waktu Pelayanan	85,09	93,15	94,91	↑ 1,76
<b>U4</b>	Biaya/Tarif Pelayanan	83,71	93,40	96,15	↑ 2,75
<b>U5</b>	Kesesuaian Produk Pelayanan	85,45	92,93	94,99	↑ 2,06
<b>U6</b>	Kompetensi Petugas	85,63	93,16	95,08	↑ 1,92
<b>U7</b>	Perilaku Petugas	90,75	96,86	97,54	↑ 0,68
<b>U8</b>	Penanganan Pengaduan	84,13	92,32	95,96	↑ 3,64
<b>U9</b>	Sarana dan Prasarana	84,60	92,56	93,96	↑ 1,40
<b>Total</b>		<b>85,30</b>	<b>93,38</b>	<b>95,17</b>	<b>↑ 1,79</b>

Peningkatan nilai terjadi pada seluruh unsur pelayanan karena telah dilakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan selama tahun 2022 yang terencana melalui

penyusunan dan implementasi rencana aksi tindak lanjut survei kepuasan masyarakat tahun 2020 dan tahun 2021.

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

Nilai interval	Mutu pelayanan	Kinerja unit pelayanan
25,00 – 64,99	D	tidak baik
65,00 – 76,60	C	kurang baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	sangat baik

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi sedang dilaksanakan sepanjang tahun 2022, dengan total responden sebanyak 359 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode Januari hingga Desember Tahun 2022. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media

- b) Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon.
- c) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022
- d) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi
- e) Peningkatan kompetensi Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan pelaksana layanan melalui Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) Ver.2022 dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan pada triwulan I s.d. IV.
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Rencana tindak lanjut:

1. *Continuous improvement* dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan.
2. Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024.

## 2.2. INDEKS KEPUASAN MEDIA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Kepuasan Media	75,5	74,02	76,64	74,5	73,55	98,72	Belum memenuhi ekspektasi	97,42	

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Media” tahun 2022 adalah 73,55 dari target sebesar 74,50, sehingga capaian indikator adalah 98,72% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan karena salah satu faktor yang turut mempengaruhi persepsi dan penilaian media terhadap layanan kehumasan BPOM pada tahun 2022 adalah pada periode berkembangnya isu terkait sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Pada

momen tersebut, perhatian media terhadap tanggapan dan hasil pengawasan BPOM sangat tinggi, yang berujung pada melonjaknya permohonan narasumber untuk menjawab pertanyaan seputar isu tersebut, baik melalui wawancara, talkshow, maupun jawaban tertulis. Akan tetapi, tingginya permohonan ini belum dapat diimbangi dengan kehadiran BPOM untuk dapat menanggapi secara langsung atau memberikan jawaban dengan cepat untuk berbagai arus pertanyaan yang masuk dari pihak media.

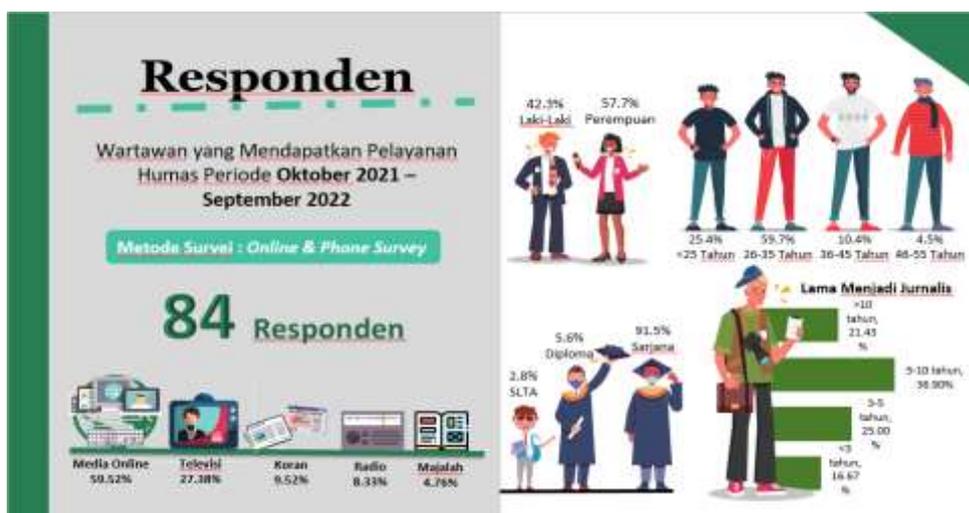
Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 74,02, terdapat penurunan sebesar -0,63%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 76,64, terdapat penurunan sebesar -4,03%. Dengan demikian, terdapat tren penurunan indeks kepuasan media selama tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 75,5, capaian indikator adalah 97,42% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari survei terhadap kepuasan media. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM. Dari hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM.

Pengukuran Indeks ini mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Media tahun 2022 melibatkan 84 wartawan yang pernah mendapatkan pelayanan kehumasan dari BPOM selama periode Oktober 2021 – September 2022. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan kuesioner dan juga *indepth interview* untuk memperdalam jawaban dari responden.

Profil demografi responden berdasarkan jenis kelaminnya, diperoleh lebih banyak responden perempuan yaitu sebanyak 58,33%, dengan responden laki-laki sebanyak 41,67%. Berdasarkan kelompok sebaran usia, responden survei. Sebagian besar (67,86%) berusia antara 26 – 35 tahun. Terkait Pendidikan terakhir, 86,90% responden merupakan Sarjana (D4/S1). Berdasarkan kategori jenis media, mayoritas responden adalah jurnalis di media online (59,52%), lalu media televisi (27,38%).



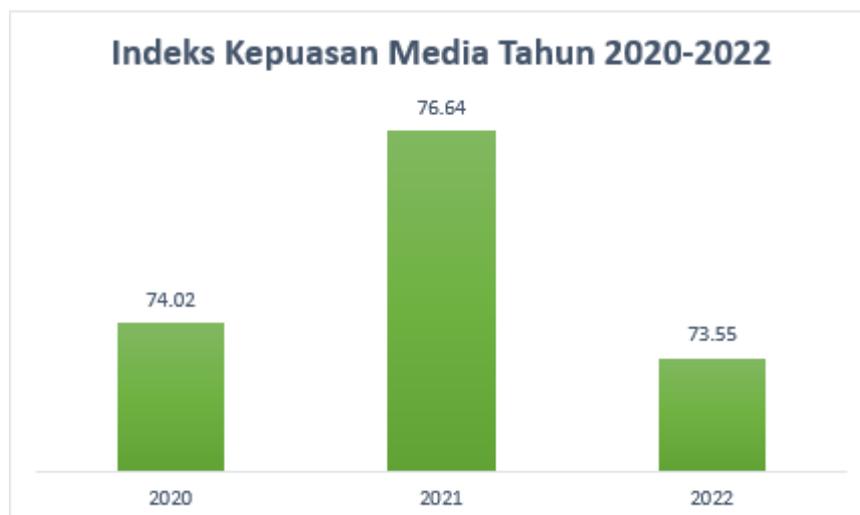
Gambar 18. Profil Responden Survei Indeks Kepuasan Media Terhadap BPOM Tahun 2022

Hasil Indeks Kepuasan Media terhadap BPOM tahun 2022 sebesar 73.55 atau masuk dalam kategori “Perlu Ditingkatkan” dari target 74,5. Dari 9 unsur pelayanan publik, Indeks kepuasan tertinggi berada pada unsur biaya/tarif pelayanan (83.33).

Tabel 10. Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Media BPOM Tahun 2022

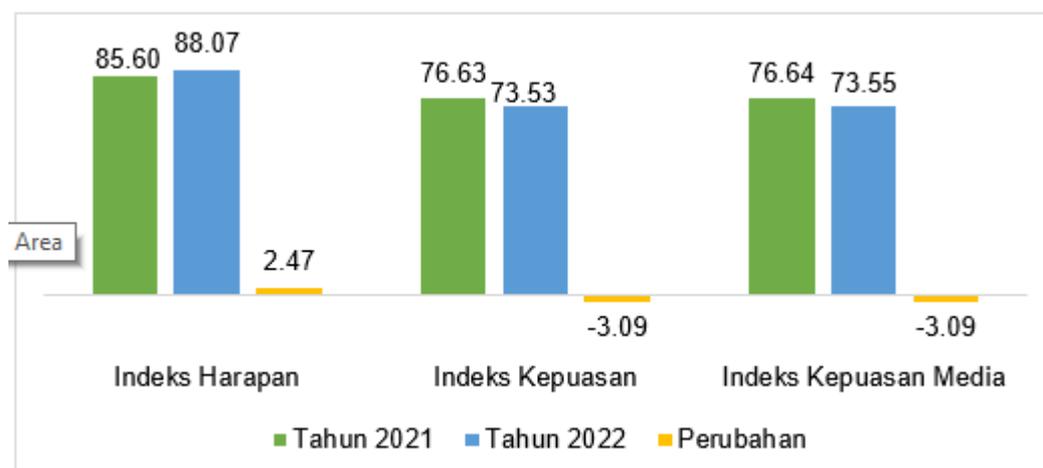
Unsur	Harapan	Kepuasan	Indeks Harapan	Indeks Kepuasan	Gap	Bobot	Bobot x Kepuasan
D.1. Persyaratan Pelayanan	3.4804	2.8236	87.01	70.59	-16.42	0.11	0.31
D.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.3929	2.8036	84.82	70.09	-14.73	0.11	0.3
D.3. Jangka Waktu Pelayanan	3.5298	2.6667	88.24	66.67	-21.58	0.11	0.3
D.4. Biaya/Tarif Pelayanan	3.5119	3.3333	87.8	83.33	-4.47	0.11	0.37
D.5. Produk/spesifikasi jenis pelayanan	3.5655	3	89.14	75	-14.14	0.11	0.34
D.6. Sarana Prasarana	3.5131	3.0145	87.83	75.36	-12.47	0.11	0.33
D.7. Kompetensi Pelaksana	3.5476	2.9246	88.69	73.12	-15.58	0.11	0.33
D.8. Perilaku Pelaksana	3.5714	2.881	89.29	72.03	-17.26	0.11	0.32
D.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.5915	3.0244	89.79	75.61	-14.18	0.11	0.34
<b>Nilai angka kepuasan masyarakat</b>							<b>2.94</b>
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>							<b>73.55</b>

Indeks Kepuasan Media Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,09 poin dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Media Tahun 2021 dan 0,47 poin dibandingkan Indeks Kepuasan Media Tahun 2020.



Gambar 19. Grafik Perbandingan Indeks Kepuasan Media Tahun 2020-2022

Indeks Harapan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.47 poin, hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan media. Berikut ini adalah perbandingan Indeks Kepuasan Media Tahun 2022 dengan Indeks Kepuasan Media Tahun 2021:



Gambar 20. Grafik Perbandingan Indeks Harapan, Kepuasan dan Kepuasan Media Tahun 2021-2022

Rekomendasi yang diperoleh dari hasil survei untuk dapat meningkatkan hubungan antara BPOM dan media, antara lain dengan menunjuk juru bicara yang responsif terhadap permohonan narasumber dari media, dibentuknya mekanisme permohonan wawancara, mengoptimalkan media informasi dan kanal khusus untuk media, dan mengadakan kegiatan media gathering secara rutin.

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Terjalinnnya komunikasi yang baik, serta perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Pengemasan informasi publik BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos secara jelas dan mudah dipahami.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.
- b. Terus aktif melakukan update database jawaban pertanyaan wawancara untuk membantu mempercepat proses penyiapan bahan untuk menjawab pertanyaan media.
- c. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.
- d. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media ter-update dengan informasi BPOM.

### 2.3. INDEKS OPINI PUBLIK BPOM

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Opini Publik BPOM	81	79,6	82,55	79	84,76	107,29	Memenuhi ekspektasi	104,64	

Realisasi “Indeks Opini Publik BPOM” tahun 2022 adalah 84,76 dari target sebesar 79, sehingga capaian indikator adalah 107,29% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan

realisasi tahun 2020 sebesar 79,6, terdapat peningkatan sebesar 6,48%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 82,55, terdapat peningkatan sebesar 2,68%. Dengan demikian terdapat tren peningkatan indeks opini publik BPOM selama tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 81, maka capaian indikator adalah 104,64% dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target tahun 2023-2024.

Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik. Survei Opini Publik terhadap BPOM merupakan survei tahunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat pada BPOM dan aspek apa saja yang menjadi faktor berpengaruh pada kepercayaan tersebut.

Survei ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah sampel 1.600 responden, dengan margin of error sebesar 2,45% pada selang kepercayaan 95%. Pada setiap rumah tangga terpilih, akan dipilih 1 (satu) orang anggota rumah tangga yang berusia 15-65 tahun sebagai responden dan dilakukan wawancara terhadap responden tersebut.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik BPOM tahun 2022 sebesar 84,76 dengan kategori nilai sangat percaya. Nilai ini meningkat 2,21 poin dibanding tahun 2021 (82,55). Indeks Opini Publik masing-masing aspek mengalami kenaikan.

Peningkatan indeks tertinggi tampak pada aspek peraturan (meningkat 3,00 poin) dan peningkatan indeks terendah pada aspek isu obat dan makanan (meningkat 1,52 poin). Berdasarkan hasil survei, Indeks Opini Publik per aspek dengan pencapaian paling tinggi terlihat pada aspek kesehatan (85,94). Sedangkan Indeks Opini Publik terendah terlihat pada aspek isu obat dan makanan (83,42). Perbandingan indeks per aspek tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 11. Perbandingan Indeks Opini Publik BPOM per Aspek Tahun 2020-2022**

Aspek	Tahun			Selisih
	2020	2021	2022	
Kesehatan	81,58	83,13	85,94	↑ 2,81
Pelayanan Publik	75,19	81,81	83,43	↑ 1,62
Ekonomi	80,93	82,06	84,35	↑ 2,29
Penindakan	78,98	82,47	84,45	↑ 1,98
Peraturan	80,30	82,81	85,41	↑ 3,00
Isu Obat dan Makanan	77,60	81,90	83,42	↑ 1,52

Beberapa upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).
3. Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM.
4. Menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM melalui kanal resmi BPOM maupun kepada media, sehingga media dan masyarakat luas ter-update dengan informasi BPOM.
5. Peningkatan awareness terkait pengelolaan media kepada kepala unit kerja dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka

komunikasi, koordinasi, dan perluasan informasi publik bagi masyarakat melalui media di daerah masing-masing.

6. Merespon isu obat dan makanan yang terjadi di masyarakat dan memberikan edukasi terkait isu tersebut.

#### 2.4. INDEKS KEPUASAN INTERNAL BPOM TERHADAP LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,78	3,80	3,50	3,72	3,68	98,92	Belum memenuhi ekspektasi	97,35	

Realisasi indikator “Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen” tahun 2022 adalah 3,68 dari target 3,72 sehingga capaian indikator adalah 98,92% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen dengan harapan dapat meningkatkan indeks kepuasan internal di tahun 2023. Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 3,80, terdapat penurunan sebesar -3,16%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 3,50, terdapat peningkatan sebesar 5,14%. Capaian indikator berfluktuasi sepanjang tahun 2020-2022. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 3,78, maka capaian indikator adalah 97,35% dengan kriteria “Akan tercapai” (Kuning).

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus =  $\frac{A+B+C+D+E}{5}$ , dimana

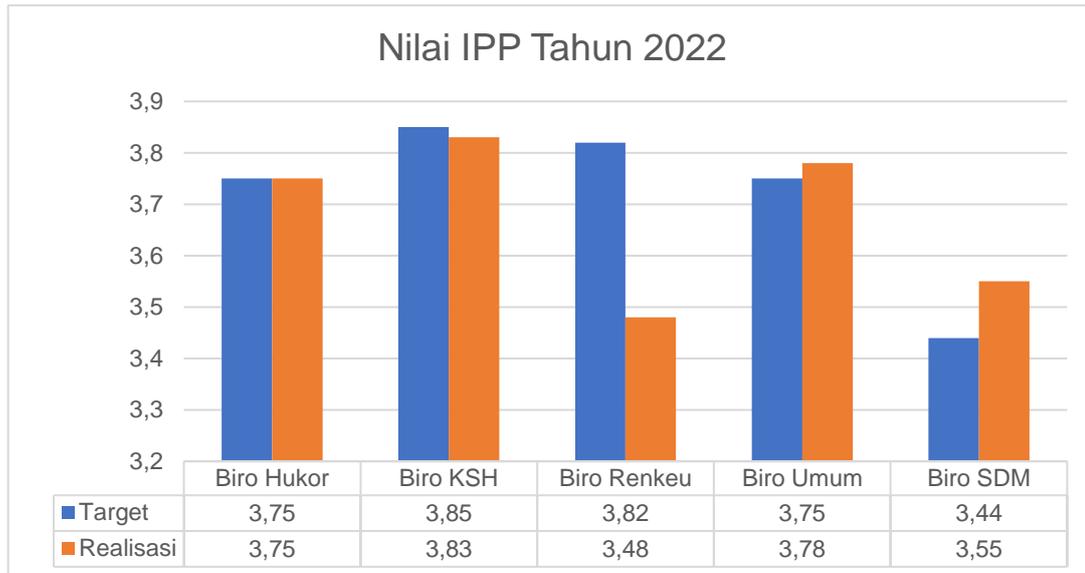
A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas

B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum



Sumber: Aplikasi SAPA APIP

Gambar. 21 Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022

Berdasarkan nilai IPP masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,68, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai. Hal ini disebabkan antara lain:

1. survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
2. Sistem survey dikunci hanya 50 responden pertama yang kemungkinan tidak menerima layanan sehingga memberikan penilaian yang kurang sesuai.
3. Terdapat Penilaian Yang Masih Rendah dari Responden yaitu :
  - a. Nilai Terendah 2 (Tidak Mudah) untuk Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan
  - b. Nilai Terendah 3 (Kurang Mudah) untuk Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana
4. Informasi terkait standar layanan dan mekanisme pengaduan masih kurang diinformasikan secara masif.

5. Kurangnya informasi yang diterima oleh pengguna layanan Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap Penanganan Pengaduan, Waktu Layanan dan Waktu Penyelesaian Layanan sehingga dinilai responden kurang baik.

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

a. Biro Kerjasama dan Humas

- 1) Memfinalisasikan Rancangan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT.
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
- 3) Fasilitasi penyelenggaraan Badan POM Week di Dubai Expo 2020, Uni Emirat Arab.
- 4) *Follow-up* visit WHO NRA *Benchmarking* tahun 2018.
- 5) Finalisasi *Grant Agreement* dan WHO *Joint Workplan Biennium 2022-2023*.
- 6) Persiapan penandatanganan Perjanjian ASEAN untuk Obat Tradisional dan Perjanjian ASEAN untuk Suplemen Kesehatan.
- 7) Persiapan Pembahasan Perjanjian ASEAN untuk obat dan vaksin.
- 8) Pelaksanaan Symposium dan Seminar RMP di ASEAN.
- 9) Persiapan sidang TBT-WTO dan SPS-WTO, serta CND.
- 10) Kunjungan dari *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia dalam rangka *sharing knowledge* terkait pengawasan produk, pengujian laboratorium, inovasi digital dan BPOM *Operational Center* (BOC), *reliance mechanism*, dan *Advanced Therapeutic Medicinal Products* (ATMP).
- 11) Sosialisasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) dan *Export Consultation Desk* (ECD);
- 12) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id), media sosial official official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarkan ke media.
- 13) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi

*early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.

- 14) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
- 15) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- 16) Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan settama dan seluruh UPT melalui *Training of Trainer Workshop* Informasi dan Komunikasi dan *Workshop Informasi dan Komunikasi Coaching* Pimpinan.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2022.
- 2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- 3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2022.
- 4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
- 5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
- 6) Bimtek dan Pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev dan keuangan untuk pembentukan loka sebagai satker mandiri.
- 7) Monitoring Arah dan Desk Program Strategis Pimpinan.
- 8) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.
- 9) Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Kalimantan.

c. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
- 2) Pendampingan pengelolaan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana terutama terkait rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM
- 3) Melakukan Awareness QMS ISO 9001:2015 bagi Unit Kerja di lingkungan BPOM per regional.

- 4) Bimbingan teknis dan pendampingan sertifikasi ISO 9001:2015 BPOM terhadap Unit Kerja yang disertifikasi.
- 5) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
- 6) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, serta pemanfaatan aplikasi [evaluasikie.pom.go.id](http://evaluasikie.pom.go.id) dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 7) Pemberian layanan KIE melalui KIE langsung (KIE Tomas, Pameran, Dialog interaktif), media sosial (BPOM, Biro Hukum dan Organisasi, PPID) dan non media sosial (media cetak, billboard, videotron, videowall, ekiosk, whatsapp blast, subsite ULPK)
- 8) Pengawasan Pelaksanaan penilaian kinerja UPP Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM.

d. Biro SDM

- 1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM.
- 2) Melakukan swab test rutin untuk pegawai prioritas kontak erat dengan covid-19 Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19.
- 3) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedeputian sesuai perencanaan.
- 4) Terlaksana vaksinasi booster untuk pegawai, pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan yoga rutin, pelayanan kesehatan. Untuk pembukaan pagu blokir menunggu informasi Rorenkeu.
- 5) Terlaksana pembahasan terkait indeks kesejahteraan pegawai dan kajian muslimah rutin serta fullday FGD Indeks kesejahteraan pegawai dan terkait pembahasan pegawai berprestasi bulan Januari dan fullboard SK Penugasan di Maret serta seminar psikoedukasi..
- 6) Telah dilaksanakan layanan pemberian gaji dan tunjangan dari Januari sd Desember 2022
- 7) Telah dilakukan pendampingan penyusunan perecnananan kinerja untuk skala pilot project untuk Dit. Reg OT, SK dan Kos, Dit Standard Pangan Olahan, Dit Cegah Tangkal, dan Dit Was Distribusi ONPP, BBPOM di Semarang, Pontianak, dan Serang.

- 8) Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama PLT Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis, sharing session dengan Kemkeu terkait pola mutasi dan redistribusi di Lingkungan Kemkeu, pembahasan draf SK Pedoman Pelaksanaan Redistribusi dan final drafting, serta pembahasan usulan mutasi dan redistribusi Tahun 2022
- 9) Terlaksana rapat panel, pelantikan pejabat struktural pada tgl 7 Januari, 8 Maret, 19 dan 21 September, 5 Oktober dan 4 November 2022, Perjadin mutasi Kepala BBPOM, Sumpah PNS, Pelantikan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada 6 Juni dan 4 November 2022. Terlaksana selter JPT Pratama (3 Kepala BBPOM), JPT Madya Sestama & Deputi 4, JPT Pratama Dirwasprod PO serta proses ukom rotasi PPT Pratama pusat dan balai.

e. Biro Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data.
- 2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan, rodent/ pest/ termite control.
- 3) Meningkatkan pemenuhan infrastuktur sarana prasarana penunjang kinerja melalui pelaksanaan kegiatan konstruksi, renovasi dan pengadaan barang/jasa (Renovasi dan Interior Gedung Batik-Rempah, Renovasi Ruang *Podcast* beberapa Gedung, Ruang *Contact Center* Gedung Merah Putih, Café Mezzanine, Perpustakaan, Pengadaan Furniture, dll).
- 4) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
- 5) Memberikan training bagi resepsionis dan security sebagai garda terdepan pelayanan publik agar dapat memberikan *service excellence* kepada *stakeholder*.
- 6) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks pada tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan Layanan terutama pada Layanan yang di Nilai Rendah Oleh Responden.
2. Melakukan sosialisasi layanan melalui media sosial masing-masing Biro.
3. Memberikan pelatihan mengenai *Service Excellent* kepada pegawai yang memberikan layanan, terutama terkait kecepatan dan kesigapan memberikan solusi, serta keramahan dan kesopanan dalam melayani.

**Sasaran 3** **Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**

***IKU***  
***Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar***

**Tabel 12. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100,00	100,00	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	
<b>Capaian SS 3</b>				<b>100,00</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**” tahun 2022 adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategis berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 3.1. PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI, LAPORAN KINERJA DAN LAPORAN KEUANGAN YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU DAN MEMENUHI STANDAR

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100,00	100,00	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	

Realisasi indikator “Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar” tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 dan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100% karena seluruh dokumen wajib diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi: (1) Renstra/ Review Renstra BPOM/ Grand Design POM/ Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renja BPOM (tahun n+1); (3) RKT BPOM (tahun n+1); (4) Perjanjian Kinerja dan RAPK BPOM (tahun n+1); (5) DIPA BPOM/POK tahun n+1; (6) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (7) Laporan Tahunan BPOM (tahun n-1); (8) Laporan Kinerja Interim BPOM (Triwulanan); (9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (10) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (11) Laporan Keuangan BPOM Triwulan III dengan total 15 (lima belas) dokumen.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan. Pada tahun 2022, seluruh dokumen

telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan secara tepat waktu dan sesuai standar.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 terkait arah kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Settama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2021 Unaudited.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I tahun 2022.
- g. Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran tahun 2022.
- h. Penyusunan RKT BPOM dan Sekretariat Utama Tahun 2023.
- i. Penyusunan Pedoman KIE.
- j. Penyusunan Dokumen Usulan target penerimaan dan penggunaan PNPB.
- k. Penyusunan Jukop DAK.

#### Sasaran 4 Meningkatkan pengelolaan Sumber daya BPOM

##### **IKU**

1. **Indeks Pengelolaan Aset**
2. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**
3. **Indeks Sistem Merit**

**Tabel 13. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	2,93	Menunggu nilai dr Kemenkeu	-	-	-	-
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	72	84,23	116,99	Memenuhi ekspektasi	105,29	
Indeks Sistem Merit	0,9	-	0,88	0,89	0,94	105,62	Memenuhi ekspektasi	104,44	
<b>Capaian SS 4</b>				<b>111,30</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” tahun 2022 adalah 111,30% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategis berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sasaran strategis ini hanya diukur dengan 2 (dua) indikator karena 1 (satu) indikator lainnya yaitu “Indeks Pengelolaan Aset” masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.

#### 4.1. INDEKS PENGELOLAAN ASET

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Pengelolaan Aset	2,98	-	-	2,93	Menunggu nilai dr Kemenkeu	-	-	-	-

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Aset” tahun 2022 masih menunggu nilai dari Kementerian Keuangan. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022, dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. Hal ini dilakukan untuk penyesuaian dalam melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan Realisasi PNB dan Pengelolaan Aset.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah tindak lanjut pengelolaan BMN dan persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi yang Andal  
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

- a. Indeks 4 (sangat baik)
- b. Indeks 3 (baik)
- c. Indeks 2 (cukup)
- d. Indeks 1 (buruk)

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara tahun 2022 untuk RKAKL tahun 2024 yang dilaksanakan untuk mengusulkan kebutuhan BMN dan angka dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2024.
2. Penyusunan draft Kebijakan Rumah Negara untuk Pejabat di Satuan Kerja Tertentu di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Penyusunan draft Kebijakan Kendaraan Operasional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Rapat Tindak Lanjut Temuan BPK terkait Barang Tidak Ditemukan (BTD); dimana proses inventarisasi telah dilaksanakan oleh satker menunggu hasil penyelesaian dari tim APIP. BTD terjadi karena adanya mobilisasi yang tinggi, sehingga data Barang dalam Ruang berbeda dengan riil barang yang ada di dalam ruangan tersebut.
5. Pembangunan aplikasi e-BMN yang dilaksanakan dalam rangka digitalisasi proses pengelolaan BMN di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Penggunaan sistem RFID untuk membantu proses pelacakan aset BMN apabila terjadi perpindahan posisi/ruangan sehingga proses tracking lebih efisien dan otomatis, serta dapat meminimalisir temuan BPK berulang terkait barang yang tidak ditemukan.
7. *Focus Group Discussion* Kebijakan Pengelolaan BMN yang dilaksanakan untuk membahas kebijakan dalam pengelolaan BMN serta pengelolaan sarana prasarana perkantoran yang ada. Pemutakhiran Data BMN yang dilakukan dalam rangka pengamanan atas aset-aset pemerintah tersebut dibutuhkan sistem Penatausahaan yang selalu termutakhirkan sehingga dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara, dan sistem tersebut pula harus dapat memenuhi kebutuhan

manajemen pemerintah dalam perencanaan pengadaan pengembangan, pemeliharaan hingga penghapusan. Pemutakhiran data BMN dilakukan tiap semester yaitu pada bulan Januari 2022 untuk semester II TA 2021 dan bulan Juli 2022 untuk semester I TA 2022.

#### 4.2. INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	-	56	72	84,23	116,99	Memenuhi ekspektasi	105,29	

Realisasi indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa” tahun 2022 adalah 84,23 dari target 72 sehingga capaian indikator adalah 116,99% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 56, terdapat peningkatan sebesar 50,41%. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 80, capaian indikator adalah 105,29% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2023-2024. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021 dimana sebelumnya menggunakan indikator “Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal”. Perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem.

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran indeks tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain :

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**  
Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.  
Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**  
Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**

- a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);  
Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).
- b) E-Tendering (Bobot 5%);  
Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.
- c) E-Purchasing (Bobot 5 %)  
Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.
- d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);  
Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.
- e) e-Kontrak (Bobot 5 %)  
Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai  $> 90$  (lebih besar dari sembilan puluh) s.d  $\leq 100$  (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai  $> 70$  (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai  $\geq 50$  (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari  $< 50$  (lima puluh).

Cara perhitungan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pada Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Indikator ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan adalah:

1. Penyediaan pelayanan dan bimbingan teknis, termasuk advokasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan POM
2. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terkait realisasi pengadaan di lingkungan Badan POM
3. Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa melalui e-Tendering
4. Komitmen seluruh Satuan Kerja dalam menggunakan aplikasi terkait pengadaan (SiRUP, e-Tendering, e-Purchasing, dan SPSE).
5. Pemenuhan 5 dari 9 variabel Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif dari LKPP
6. Membangun sistem layanan pengadaan barang/jasa melalui Subsite Biro Umum BPOM dalam rangka koordinasi, komunikasi dan pendampingan yang intensif dengan unit kerja di lingkungan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis serta stakeholder terkait.
7. Perkuatan SDM UKPBJ sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 74A Ayat 8 yang menyatakan bahwa Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pemenuhan SDM PBJ dilaksanakan melalui mekanisme redistribusi dan alih jabatan JF PPBJ .

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Triwulan III Tahun Anggaran 2022. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi sekaligus pembinaan ke satuan kerja Badan POM yang ada di daerah, dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Lanjutan sewa digitalisasi yang menunjang kebutuhan Badan POM sebagai knowledge based and learning organization dan mengingat media komunikasi publik secara digital saat ini sangat berkembang. Dimana saat ini telah ditetapkan pemenang tender dan akan diproses pelaksanaannya.

### 4.3. INDEKS SISTEM MERIT

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Sistem Merit	0,9	0,88	0,88	0,89	0,94	105,62	Memenuhi ekspektasi	104,44	

Realisasi indikator “Indeks Sistem Merit” tahun 2022 adalah 0,94 dari target 0,89 sehingga capaian indikator adalah 105,62% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Pengukuran indeks sistem merit dilakukan oleh KASN pada Bulan Juli 2022 dan **mendapatkan nilai 387,5 dengan indeks 0,94 kategori sangat tinggi level IV**. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 0,88, terdapat peningkatan sebesar 6,82%. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 0,9, capaian indikator sebesar 104,44% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penetapan target tahun 2024.

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari tahun 2020, maka untuk target dan realisasi tahun 2021 sama dengan realisasi indeks tahun 2020. Target dan realisasi tahun 2023 sama dengan target dan realisasi indeks tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0,86 sampai dengan 1.



Berdasarkan hasil penilaian KASN, BPOM mendapatkan peningkatan nilai penerapan Sistem Merit sebesar 23,5 total nilai sementara menjadi 387,5 dengan indeks 0,94 yang telah ditetapkan melalui Keputusan KASN Nomor 25/KEP.KASN/C/VII/2022.

Gambar 22. Penghargaan Anugerah Meritokrasi KASN 2022 atas Penerapan Sistem Merit Kategori Sangat Baik

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

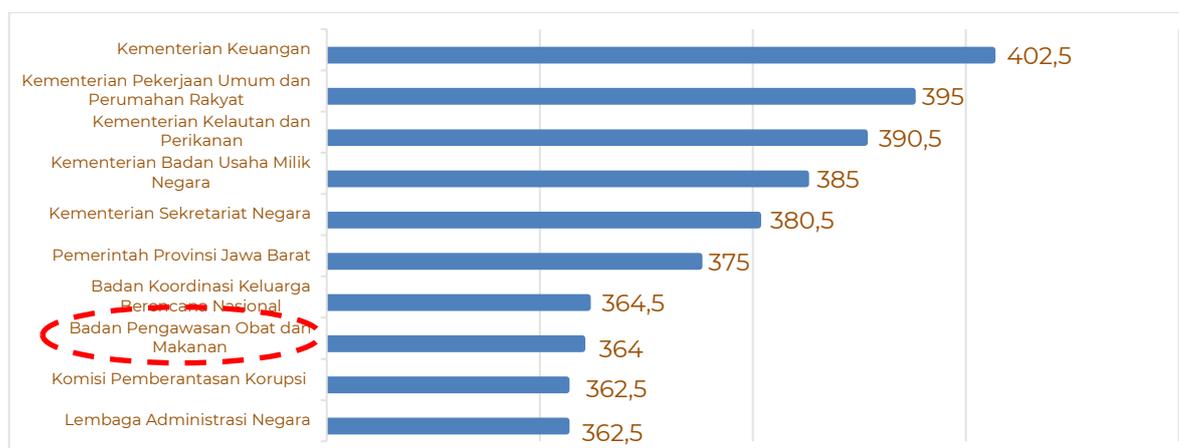
Nilai final assessment sistem merit tahun 2020-2022 sebagai berikut:

**Tabel 14. Nilai Final Assessment Sistem Merit Tahun 2020-2022**

ASPEK	NILAI MAKSIMAL	NILAI 2020	NILAI 2022	KETARANGAN CAPAIAN HASIL PENILAIAN TAHUN 2022
Perencanaan Kebutuhan	40	35	40	Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>5 poin</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menetapkan peta jabatan yang disusun berdasarkan Anjab/ABK</li> <li>▪ Menyusun, Menyempurnakan dan Menetapkan rencana pemenuhan untuk jangka menengah (5 tahun)</li> </ul>
Pengadaan	40	40	40	Hasil penilaian tetap sama sudah mendapat <b>nilai maksimal (40)</b>

ASPEK	NILAI MAKSIMAL	NILAI 2020	NILAI 2022	KETARANGAN CAPAIAN HASIL PENILAIAN TAHUN 2022
Pengembangan karier	120	107,5	117,5	<p>Terdapat kenaikan nilai sebesar <b>10 poin</b> karena evaluasi hasil penilaian dari KASN pada tahun 2020 sudah ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyempurnakan peta profil kompetensi pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara</li> <li>Menyusun talent pool dan menyusun rencana suksesi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara</li> <li>Pemanfaatan Manajemen Talenta untuk pengisian JPT Pratama dan Pengawas pada Tahun 2021 (<i>Pilot Project</i>)</li> <li>Sudah dibangun aplikasi Manajemen Talenta Terintegrasi (Mentari) untuk tahap akuisisi</li> </ul>

Perbandingan nilai sistem merit BPOM dan K/L lain sebagai berikut:



Gambar 23. Top 10 Meritokrasi ASN Tahun 2022

Beberapa hal yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

1. Jabatan yang ada di lingkungan BPOM telah memiliki standar kompetensi jabatan
2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja
3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka
4. BPOM telah memiliki manajemen pengelolaan karier pegawai yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta
5. BPOM memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan
6. Telah menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN
7. Telah terdapat kesempatan yang sama terkait pengembangan kompetensi untuk setiap pegawai
8. Telah memiliki sistem informasi berbasis kompetensi dan hasil kinerja individu yang dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN (SIASN)

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penyusunan SKP Tahun 2022
- b. Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
- c. Pengisian jabatan struktural
- d. Pembinaan jabatan fungsional
- e. Pengangkatan dalam jabatan fungsional
- f. Pengelolaan kenaikan pangkat/pensiun pegawai di lingkungan Badan POM
- g. Pendampingan, Monitoring dan evaluasi penyusunan kinerja individu beserta gap kinerja untuk unit Pusat, Balai/Balai Besar POM dan Loka POM triwulan IV Tahun 2021 dan triwulan I, II, III tahun 2022.
- h. Telah dilaksanakan *reassessment* sistem merit oleh KASN pada 13 April 2022.

**Sasaran 5****Organisasi Yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran****IKU**

1. **Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan**
2. **Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015**

**Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	
<b>Capaian SS 5</b>				<b>100,00</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Organisasi yang Tepat Fungsi, Tepat Proses, dan Tepat Ukuran**” tahun 2022 adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

**5.1. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATAAN**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan” tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 dan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%. Namun demikian terdapat perbedaan unit organisasi yang dilakukan penataan tiap

tahunnya. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Unit kerja BPOM terdiri atas 33 unit kerja pusat meliputi 30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN serta 73 UPT BPOM meliputi 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM.

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPOM dengan Kementerian PANRB dalam melakukan pembahasan terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Selain itu pembentukan Tim Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 telah memudahkan dalam rangkaian kegiatan evaluasi kelembagaan sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Menyampaikan permintaan persetujuan prinsip dan melakukan audiensi dengan Kementerian PANRB.

2. Menyampaikan Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang OTK UPT di Lingkungan BPOM ke seluruh unit kerja dan UPT.
3. Melakukan pendampingan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) ke beberapa Unit Pelayanan Publik.

## 5.2. PERSENTASE UNIT ORGANISASI YANG MENERAPKAN PROSES BISNIS SESUAI ISO 9001:2015

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	

Realisasi indikator “Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015” tahun 2022 adalah 100% dari target 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00%. Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 dan target akhir periode Renstra (2024) yaitu 100%. Namun demikian, terdapat perbedaan jumlah unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 tiap tahunnya berdasarkan *roadmap* tahun 2021-2024.

Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) berdasarkan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Penambahan total unit kerja pusat dan UPT berdasarkan pembentukan unit kerja pusat dan UPT baru (dikecualikan untuk perubahan nomenklatur unit kerja), dihitung pada tahun  $n+2$ .

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 yaitu dengan membandingkan unit organisasi yang menerapkan

proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 dengan total unit organisasi. Pada tahun 2022, persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 telah mencapai target yaitu dari 104 total unit organisasi di BPOM yang menerapkan dari target 104 unit organisasi. 2 (dua) unit kerja yang baru menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 di tahun 2022 adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Keberhasilan pencapaian target terutama didukung oleh kegiatan pendampingan yang dilaksanakan. Pendampingan Persiapan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk 2 Unit Kerja Pusat oleh Biro Hukum dan Organisasi.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Reviu Tinjau Ulang Proses Bisnis BPOM dengan mengadakan pembahasan bersama unit kerja terkait.
- b. Pembahasan dalam rangka Integrasi Manual Organisasi BPOM dengan ISO 45001:2018.
- c. Bimbingan teknis pendampingan Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

## Sasaran 6 Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum

### IKU

1. *Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan*
2. *Persentase Advokasi Hukum yang efektif*

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	95,75	96,88	101,17	Memenuhi ekspektasi	100,39	
<b>Capaian SS 6</b>				<b>100,59</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum**” tahun 2022 adalah 100,59% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 6.1. PERSENTASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISELESAIKAN

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100,00	Memenuhi ekspektasi	100,00	

Realisasi indikator “Persentase Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan” tahun 2022 adalah 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan III sebesar 77,21%, terdapat peningkatan sebesar 22,79%. Realisasi tahun 2022 sama dengan realisasi tahun 2020 dan 2021 dan target akhir periode

Renstra (2024) yaitu 100%. Namun demikian, jumlah rancangan Peraturan Perundang-undangan yang disusun berbeda setiap tahunnya.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
  - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
  - b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM
  - c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
  - d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
  - e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 246 perUU dari 246 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja karena salam penyusunan peraturan perundang-undangan berupa rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama, Biro Hukum dan Organisasi selalu melakukan koordinasi dengan unit teknis pemrakarsa. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan SOP POM 01 mengenai Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
- b. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

## 6.2. PERSENTASE ADVOKASI HUKUM YANG EFEKTIF

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase Advokasi Hukum yang Efektif	96,5	94,63	95,97	95,75	96,88	101,17	Memenuhi ekspektasi	100,39	

Realisasi indikator “Persentase Advokasi Hukum yang Efektif” tahun 2022 adalah 96,88% dari target 95,75%, sehingga capaian indikator adalah 100,18% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 94,63%, maka terdapat peningkatan sebesar 2,37%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 95,97% maka terdapat peningkatan sebesar 0,94%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra sebesar 96,5%, maka capaian indikator adalah 100,39% dengan kategori “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2024.

Advokasi Hukum meliputi:

### 1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

### 2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif yaitu jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Pada tahun 2022, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 310 layanan dari 320 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 96,88%.

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan kinerja dan anggaran yang disusun secara efektif dan efisien; pelaksanaan oleh tim kerja yang dilakukan secara konsisten dan optimal; serta koordinasi internal/eksternal yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam lingkup pelaksanaan kinerja.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pertimbangan Hukum.
- b. Penanganan Perkara Hukum.
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
- d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.

## Sasaran 7 Meningkatkan kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

### IKU

1. *Persentase kerja sama yang efektif*
2. *Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media*
3. *Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti*

Tabel 17. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86	86,62	100,72	Memenuhi ekspektasi	96,24	
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	99,84	97,68	97,83	Belum memenuhi ekspektasi	97,81	
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	66	76,67	116,16	Memenuhi ekspektasi	112,75	
<b>Capaian SS 7</b>				<b>104,91</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**” tahun 2022 adalah 104,91% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

### 7.1. PERSENTASE KERJASAMA YANG EFEKTIF

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase kerja sama yang efektif	90	91,67	88,76	86	86,62	100,72	Memenuhi ekspektasi	96,24	

Realisasi indikator “Persentase kerja sama yang efektif” tahun 2022 adalah 86,62% dari target sebesar 86%, sehingga capaian indikator adalah 100,72% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91,67%, maka terdapat penurunan sebesar -5,51%. Hal ini disebabkan adanya perubahan definisi operasional dan cara

pengukuran indikator. Pada tahun 2021, indikator ini memperhitungkan peran BPOM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral, sedangkan di tahun 2020 tidak diperhitungkan. Berdasarkan perhitungan menggunakan 2 (dua) indikator pembentuk yang baru, realisasi tahun 2020 sebesar 83,33%, Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,76%, maka terdapat penurunan sebesar -2,41%. Hal ini disebabkan karena terdapat penambahan kerja sama baru di triwulan IV tahun 2022 yang belum diimplementasikan. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 90%, maka capaian indikator adalah 96,24% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (86,65 + 86,59) / 2 = 86,62 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Keberhasilan pencapaian Indikator persentase kerja sama yang efektif tahun 2022 karena peningkatan koordinasi dan fasilitasi melalui pembentukan tim pengelola kerja sama dalam negeri, tim perunding, dan lainnya serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama secara berkala.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, idEA, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Diponegoro, Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara Badan POM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN, Badan Hukum Publik, BRIN, Baintelkan Polri, Palang Merah Indonesia, KPI, Kwartir Nasional Pramuka, dll;
- b. Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- c. Penandatanganan MoU antara Badan POM dengan Ministry of Health Palestina.

- d. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko, Ministry of Agriculture and Forestry Republik Turki, TGA Australia, Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL), dll;
- e. Penjajakan kerja sama Badan POM dengan mitra luar negeri seperti, SID&GP Rusia, IQTL Timor Leste, dan CFIA Kanada;
- f. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra luar negeri seperti, MoCCA E PEA, PPB Kenya, dan Kementerian Kesehatan Kenya dan penyampaian;
- g. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan SFDA tentang perkembangan pengawasan Obat sirup (EG dan DEG) oleh Badan POM serta tentang pencabutan larangan impor produk daging dan unggas serta pembahasan perijinan impor produk hewan lainnya ke Arab Saudi;
- h. Penyelenggaraan business forum di bidang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan di Kenya;
- i. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin dan penyampaian Posisi BPOM pada Initial Offer dalam kerangka Indonesia - Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA);
- j. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, The Meeting of JAIF Project, Symposium dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, PPWG, dll;
- k. Pelaksanaan kerja sama multilateral seperti, WHO follow-up visit Benchmarking NRA Assesment, WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023, ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, The Eleventh Meeting of MSM on SFMP, WHO SEARN Steering Group Meeting, dll.

## 7.2. PERSENTASE KUALITAS PEMBERITAAN BPOM DI MEDIA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,86	99,84	99,82	99,84	97,68	97,83	Belum memenuhi ekspektasi	97,81	

Realisasi indikator “Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media” tahun 2022 adalah 97,68% dari target 99,84%, sehingga capaian indikator adalah 97,83% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 99,84%, maka terdapat penurunan sebesar -2,17%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 99,82%, maka terdapat penurunan sebesar -2,15%. Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan pemberitaan dengan tonasi negatif akibat maraknya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGPA) akibat cemaran etilen glikol dan dietiln glikol pada sediaan obat sirup anak.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Pada tahun 2022, dari 36.919 berita tentang BPOM, terdapat 18.608 berita dengan tonasi netral, 17.453 berita dengan tonasi positif, dan 858 berita dengan notasi negatif.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.

- b. BPOM membangun agenda setting yang diorkestrasi dan diamplifikasi oleh Unit kerja dan UPT untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penerbitan siaran pers mengenai vaksin booster yang ditunggu masyarakat. Penerbitan EUA lima vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster telah mendominasi pemberitaan. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Pada bulan ini, topik pemberitaan lain terkait Badan POM yaitu penerbitan EUA untuk Obat Molnupiravir dan EUA untuk Vaksin Sinopharm sebagai Dosis Booster.
- b. Pemberitaan didominasi terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Merah Putih sehingga semakin mengukuhkan perkembangan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri. penerbitan PPUK ini juga menjadi daya tawar yang kuat bagi produksi obat dan vaksin dalam negeri untuk bersaing dipasar global.
- c. Pemberitaan didominasi terkait operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor serta pemberitaan terkait penetapan Perpanjangan Batas Kedaluwarsa (Expired Date/ED) Vaksin COVID-19.
- d. Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang di luar negeri seperti penarikan produk Formula Bayi di Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi Cronobacter sakazakii dan Salmonella Newport serta penarikan produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Negara Uni Eropa karena cemaran Salmonella.
- e. Dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika dalam bentuk program Orang Tua Angkat Jamu.
- f. Pemberitaan didominasi terkait pengawasan takjil dan pasar. Media memberitakan berbagai pengawasan UPT BPOM terhadap pangan untuk berbuka puasa di

- beragam tempat. UPT juga melakukan pengawasan ke pasar untuk mengawasi pangan selama Ramadan dan jelang Idul Fitri.
- g. Pemberitaan didominasi terkait rencana BPOM atas Pelabelan BPA free pada produk AMDK. Hal ini menuai pro-kontra, banyak pihak yang menyatakan penolakan atas rencana revisi kebijakan tersebut selain pihak yang mendukung pelabelan dengan pertimbangan dampak kesehatan.
  - h. Pemberitaan tentang rencana pelabelan BPA Free pada AMDK yang memuat upaya BPOM yang terus menegaskan pentingnya pelabelan BPA Free pada AMDK sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat masih mendominasi. Selain itu pemberitaan juga memuat mengenai upaya BPOM menindak tegas sarana produksi tahu berformalin beromset ratusan juta di parung, Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, dan Vaksin Merah Putih.
  - i. Pemberitaan terbanyak tentang BPOM RI Tarik Produk Es Krim Haagen-Dazs Rasa Vanila dan BPOM Beri Izin Paxlovid Jadi Obat Covid-19
  - j. Pemberitaan terbanyak tentang BPOM Izinkan Anak Usia 16-18 Tahun Terima Vaksin Booster dan Uji Klinis Vaksin Indovac dan Inavac
  - k. Pemberitaan terbanyak tentang BPOM Terbitkan EUA Vaksin Indovac dan Awcorna dan Pernyataan BPOM mengenai penarikan mie sedaap di Hong Kong.

### 7.3. PERSENTASE PERMOHONAN WAWANCARA MEDIA YANG DITINDAKLANJUTI

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	68	-	65,91	66	76,67	116,16	Memenuhi ekspektasi	112,75	

Realisasi indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” tahun 2022 adalah 76,67% dari target 66% sehingga capaian indikator adalah 116.16% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2021 berdasarkan hasil revidu Renstra Sekretariat Utama. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 65,91%, maka terdapat peningkatan sebesar 16,32%. Peningkatan yang cukup tinggi didorong oleh banyaknya permohonan wawancara yang diterima oleh BPOM saat

merebaknya isu produk sirup obat mengandung Etilen Glikol/Dietilen Glikol. Dibandingkan target akhir periode Resntra sebesar 68%, maka capaian indikator adalah 112,75% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target tahun 2024.

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan indikator “persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%. Pada tahun 2022 telah dilakukan 92 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 120 permohonan, dengan rincian 41 (empat puluh satu) wawancara langsung, 48 (empat puluh delapan) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow. Realisasi pelaksanaan wawancara/*talkshow* telah melebihi target disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Permohonan wawancara kepada Badan POM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2. Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan.
3. Pada triwulan 1, banyak wawancara langsung terkait isu yang berkembang di masyarakat maupun pasca konferensi pers dan ditanggapi Badan POM dengan menghadirkan narasumber dari unit teknis baik eselon 1 maupun eselon 2 serta pemenuhan permintaan kunjungan ke laboratorium. Sedangkan pada triwulan kedua ini terkait dengan isu BPA, BPOM menanggapi dengan memenuhi wawancara dari salah satu media, yang kemudian dikutip dan diberitakan oleh media lain.
4. Pada triwulan 3, terdapat beberapa permohonan seputar isu yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk hal yang masih belum jelas dan

belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan tersebut direspons/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa belum ada perkembangan terbaru mengenai hal yang ditanyakan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung.
2. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat dapat direspons dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk dengan memberikan jawaban secara langsung via WhatsApp, menggunakan standar jawaban yang telah disepakati dengan unit terkait.
3. Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan, ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.

#### Sasaran 8 Meningkatkan kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama

##### IKU

1. *Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti*
2. *Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama*
3. *Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sektama*

Tabel 18. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,4	99,70	100,30	Memenuhi ekspektasi	99,90	
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,37	94,54	100,18	Memenuhi ekspektasi	96,28	
Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sektama	4,65	4,48	4,59	4,55	4,90	107,69	Memenuhi ekspektasi	105,38	
<b>Capaian SS 8</b>				<b>102,72</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama**” tahun 2022 adalah 102,72% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

### 8.1. PERSENTASE LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti	99,8	99,47	99,44	99,4	99,70	100,30	Memenuhi ekspektasi	99,90	

Realisasi indikator “Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti” tahun 2022 adalah 99,70% dari target sebesar 99,4% sehingga capaian indikator adalah 100,30% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 99,47%, maka terdapat peningkatan sebesar 0,23%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 99,44%, maka terdapat peningkatan sebesar 0,26%. Apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 99,8%, maka capaian indikator adalah 99,90% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Definisi indikator “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti” adalah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat. Cara perhitungan “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti di lingkup Sekretariat Utama” adalah jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Pada tahun 2022, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 28.214 layanan dari 28.300 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti

sebesar 99,70%. Indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Kinerja ini didukung oleh SDM yang berkompeten dan meningkatnya kecepatan penyelesaian layanan dan waktu respon layanan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
- b. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022.
- c. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID pelaksana unit kerja dan UPT.
- d. Dukungan penyediaan bahan informasi terkini bagi Agent Contact Center, terutama isu-isu yang berkembang di masyarakat, regulasi terbaru dan pelayanan publik.
- e. Komitmen dan koordinasi yang solid dari unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi.
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala.

## 8.2. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama	94,37	91	93,71	94,37	94,54	100,18	Memenuhi ekspektasi	96,28	

Realisasi indikator “Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama” tahun 2022 adalah 94,54 (Sangat Efektif) dari target sebesar 94,37, sehingga capaian indikator adalah 100,18% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 91%, maka terdapat peningkatan sebesar 3,89%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 93,71%, maka terdapat peningkatan sebesar 0,89%. Peningkatan

nilai indeks ini disebabkan oleh adanya peningkatan pada indikator “Minat”. Indikator Minat mengalami kenaikan poin yang cukup signifikan dimana keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih banyak terkait pengawasan obat dan makanan, *update* pengujian sirup obat dan tips konsumsi obat dan makanan aman mengalami peningkatan setelah merebaknya kasus kasus Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat pada triwulan 4. Selain itu juga terjadi peningkatan frekuensi KIE terutama KIE di media sosial serta kegiatan KIE langsung yg merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat menurut responden. Selain itu ditambah dengan terbitnya pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dengan *branding* “KataBPOM”, pelaksanaan KIE secara langsung dan melalui media lain seperti media sosial, media digital, media cetak menjadi lebih mudah diingat oleh masyarakat. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 96,28% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Kegiatan KIE yaitu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan KIE, dilakukan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yaitu ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Indeks Efektivitas KIE.

Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil survei efektivitas KIE kepada sejumlah responden yang pernah mendapatkan KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Pada tahun 2022, survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh Sekretariat Utama melibatkan 566 responden. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 - 75,00	Cukup Efektif
75,01 - 85,00	Efektif
85,01 - 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022 adalah 94,45 dengan kategori **Sangat Efektif**.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
- b. Rapat Koordinasi Nasional KIE BPOM Tahun 2022
- c. Pelaksanaan KIE dalam bentuk KIE langsung, media sosial dan non media sosial melalui ragam kegiatan.



Gambar 24. Pelaksanaan KIE sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

### 8.3. INDEKS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022			Capaian terhadap Target 2024		
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama	4,65	4,48	4,59	4,55	4,90	107,69	Memenuhi ekspektasi	105,38	●

Realisasi indikator “Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama” tahun 2022 sebesar 4,9 dari target 4,55 sehingga capaian indikator adalah 107,69% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 4,48, maka terdapat peningkatan sebesar 9,38%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 4,59, maka terdapat peningkatan sebesar 6,75%. Peningkatan ini karena adanya perbaikan

pelaksanaan pelayanan termasuk data dukung yang disampaikan dalam pelaksanaan evaluasi. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 4,65, maka capaian indikator adalah 105,38% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2024.

Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
  - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
  - b. Profesionalitas SDM (18%);
  - c. Sarana Prasarana (15%);
  - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
  - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
  - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP dilingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Sektama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi.
  - a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek sebagaimana disebut pada poin 1. Penilaian dilakukan melalui aplikasi [evortala.pom.go.id](http://evortala.pom.go.id) oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.
  - b. Kategori nilai:

<b>Range Nilai</b>	<b>Kategori</b>	<b>Makna</b>
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup ( <i>Dengan Catatan</i> )
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik ( <i>Dengan Catatan</i> )
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
  - a. Aspek kebijakan pelayanan
    - i. Melakukan review dan penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang terdiri dari 14 komponen pelayanan. pada revisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPO
    - ii. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
    - iii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
    - iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
  - b. Aspek Profesionalisme SDM
    - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
    - ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
  - c. Aspek Sarana Prasarana  
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.

- d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik  
Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
  - e. Aspek Konsultasi dan pengaduan  
Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
  - f. Aspek Inovasi  
Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.
  3. Rapat pembahasan pembentukan Tim Penilai Unit Pelayanan Publik BPOM dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 pada tanggal 22 Maret 2021.
  4. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM Tahun 2021.
  5. Monev implementasi rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024.

### Sasaran 9 Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sektama yang Optimal

#### IKU

1. *Indeks RB Sekretariat Utama*
2. *Nilai AKIP Sekretariat Utama*

Tabel 19. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	81,5	90,30	110,80	Memenuhi ekspektasi	105,61	
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	85,3	80,35	94,20	Belum memenuhi ekspektasi	89,38	
<b>Capaian SS 9</b>				<b>102,50</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal**” tahun 2022 adalah

102,50% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

### 9.1. INDEKS REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks RB Sekretariat Utama	85,5	73,75	79,47	81,5	90,30	110,80	Memenuhi ekspektasi	105,61	

Realisasi indikator “Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Utama” tahun 2022 adalah 90,30 dari target 81,5 sehingga capaian indikator ini adalah 110,80% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 73,75, maka terdapat peningkatan sebesar 22,44%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 79,47, maka terdapat peningkatan sebesar 13,63%. Terdapat tren peningkatan indeks RB yang cukup signifikan dalam kurun waktu tahun 2020-2022. Peningkatan ini disebabkan karena Biro-Biro selalu melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun Zona Integritas (ZI) sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), maka capaian indikator adalah 105,61% dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target tahun 2024.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

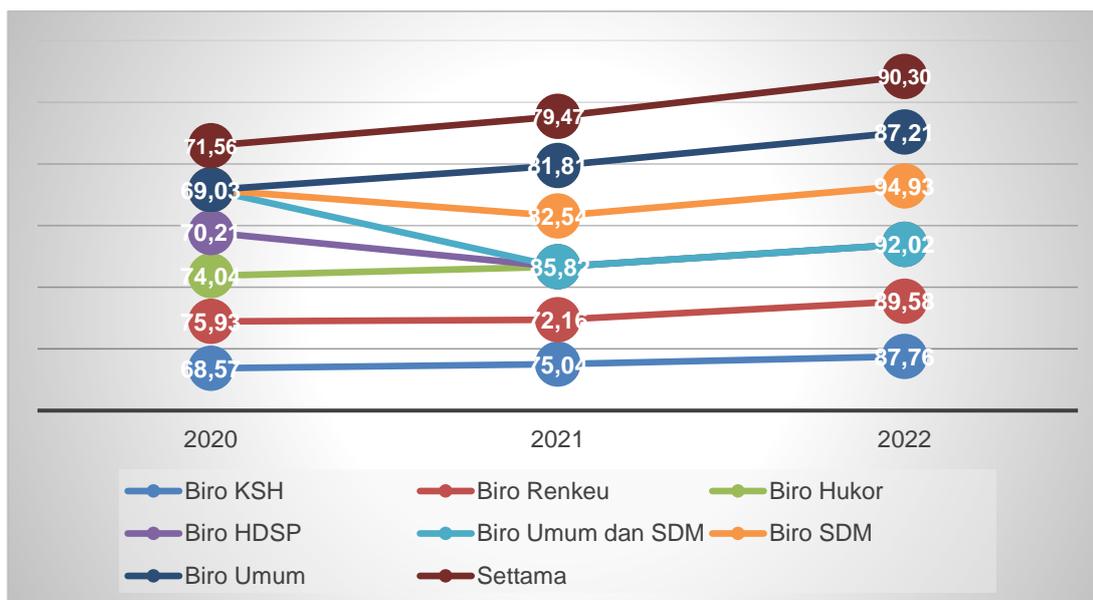
Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Indeks RB Sekretariat Utama tahun 2022 diperoleh dari rata-rata nilai hasil evaluasi PMPZI Biro-Biro di Sekretariat Utama. Realisasi indeks RB Settama tahun 2020-2022 sebagai berikut:



Gambar 25. Realisasi indeks RB Settama tahun 2020-2022

Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Penataan Tatalaksana
  - 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
  - 2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
  - 3) Pemutakhiran data pengelola *subsiste* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
  - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan
- b. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdasarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
  - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2021 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
  - 3) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural dan pelantikan pengangkatan jabatan fungsional.
  - 4) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.

- 5) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2022
  - 6) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP.
  - 7) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
  - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022 secara berkala periode triwulan
  - 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
  - 4) FGD Penyusunan Laporan Kinerja, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
  - 5) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.
  - 6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
  - 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021, dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
  - 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu ([esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id)) Kementerian PANRB.
  - 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan IV Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
  - 10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.
  - 11) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2021.
  - 12) Penerbitan PerBPOM tentang revisi Pedoman SAKIP di Lingkungan BPOM dan revisi Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan di Lingkungan BPOM.

d. Penguatan Pengawasan

- 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
- 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW IV 2021.
- 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense.
- 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
- 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021.
- 6) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
- 7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW III 2022.
- 8) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
- 9) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.

e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
- 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
- 3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
- 5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.

- 7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
- 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
- 10) Partisipasi dalam Kompetisi Pelayanan Publik Nasional lainnya.

## 9.2. NILAI AKIP SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai AKIP Sekretariat Utama	89,9	80,69	81,20	85,3	80,35	94,20	Belum memenuhi ekspektasi	89,38	

Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat Utama” tahun 2022 adalah 80,35 dari target 85,3 sehingga capaian indikator adalah 94,20% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 80,69, terdapat penurunan sebesar -0,42%. Dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 81,20, terdapat penurunan sebesar -1,05%. Penurunan ini disebabkan terjadi penurunan nilai pada komponen “Perencanaan Kinerja” dan “Pelaporan Kinerja”. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 89,38% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reuiu LKE oleh Tim Penilai Internal (TPI).

Evaluasi AKIP tahun 2022 oleh TPI mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor: PI.04.7.72.11.22.358 tanggal 11 November 2022. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja (24%) meliputi kriteria: Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (4,80%), Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik (7,20%), dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (12,00%).
2. Pengukuran Kinerja (24%) meliputi kriteria: Pengukuran Kinerja telah dilakukan (4,80%), Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (7,20%), Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (12,00%).
3. Pelaporan Kinerja (12%) meliputi kriteria: Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (2,40%), Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya (3,60%), dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (6,00%).
4. Evaluasi Internal (20%) meliputi kriteria: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (4,00%), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (6,00%), Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (10,00%).
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi kriteria: Kinerja yang dilaporkan (output) (7,5%) dan Kinerja yang dilaporkan (outcome) (12,5%).

Cara perhitungan Nilai AKIP Sektama berdasarkan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (**Sangat Memuaskan**) dengan nilai >90-100
2. A (**Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
3. BB (**Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80

4. B (**Baik**, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
5. CC (**Cukup Memadai**, akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
6. C (**Kurang**, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
7. D (**Sangat Kurang**, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Tren nilai AKIP Sekretariat Utama Tahun 2020-2022 sebagai berikut:

No	Komponen	Nilai					Selisih
		Bobot	2020	2021	Bobot	2022	
1	Perencanaan Kinerja	30	26,24	26,49	24	19,68	↓ -6,81
2	Pengukuran Kinerja	25	19,06	19,38	24	19,68	↑ 0,30
3	Pelaporan Kinerja	15	13,21	13,48	12	9,84	↓ -3,64
4	Evaluasi Internal	10	8,13	8,50	20	15,40	↑ 6,90
5	Capaian Kinerja	20	14,06	13,36	20	15,75	↑ 2,39
Total			<b>80,69</b>	<b>81,21</b>		80,35	

Terdapat penurunan yang signifikan pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Beberapa hal yang menyebabkan penurunan tersebut yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) telah menjabarkan target-target yang ada dalam dokumen PK menjadi bulanan dan triwulanan dan telah disahkan oleh Kepala Satuan Kerja, namun masih terdapat ketidakselarasan dokumen perencanaan yaitu masih terdapat perbedaan indikator dan target indikator pada dokumen PK dan RAPK.

2. Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja juga telah menginformasikan terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun belum terdapat penjelasan terkait upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya.

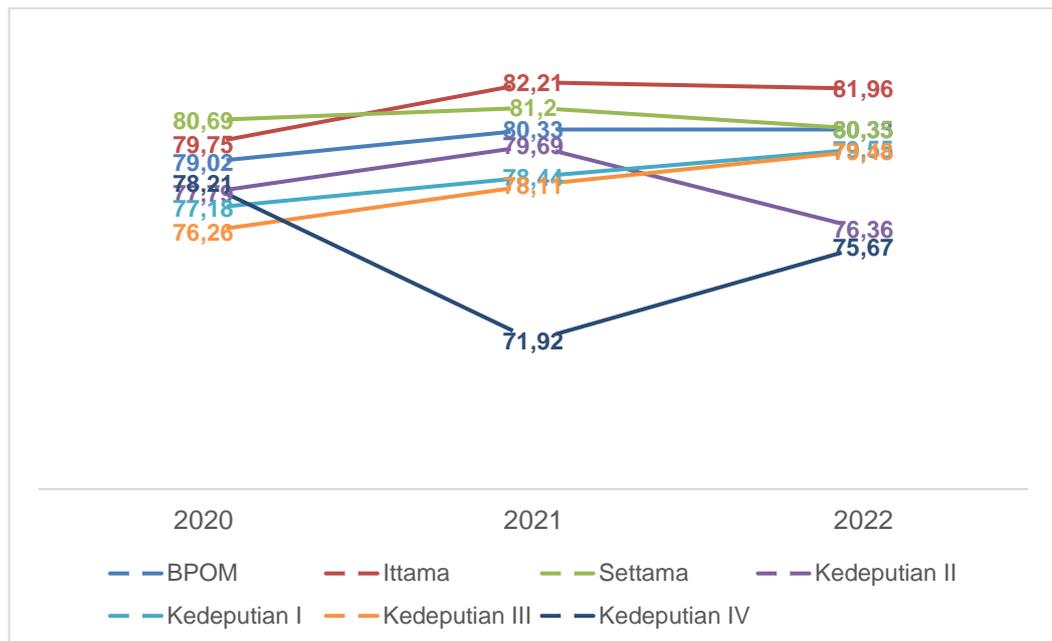
Informasi dalam laporan kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan kinerja. Namun demikian pemanfaatan atas informasi kinerja tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, terutama digunakan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini terlihat dari masih adanya capaian kinerja yang lebih rendah dari tahun sebelumnya dan target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum seluruhnya dapat dicapai dengan baik. Selain itu belum terdapat keselarasan antara capaian kinerja individu dengan capaian kinerja level di atasnya (Unit Kerja).

Beberapa rekomendasi untuk peningkatan nilai AKIP Settama ke depan antara lain:

1. Menyelaraskan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Perjanjian Kinerja, RKT dan RAPK untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam pengukuran capaian kinerja.
2. Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.
3. Menyempurnakan fungsi dan pemanfaatan aplikasi pengukuran data kinerja yaitu aplikasi SIMETRIS sehingga diperoleh data kinerja yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan
4. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk perbaikan/peningkatan kinerja.
5. Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja.
6. Menyelaraskan perhitungan capaian indikator kinerja tingkat unit sampai tingkat individu dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana aksi
8. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi dan mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya serta memanfaatkan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

9. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).
10. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala dan mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Nilai AKIP Settama dengan unit Eselon I lain di BPOM sebagai berikut:



Gambar 26. Perbandingan Nilai AKIP Settama dengan BPOM dan Unit Eselon I

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Nilai AKIP settama berada di peringkat kedua setelah Ittama. Dibandingkan nilai AKIP BPOM, nilai AKIP Settama sama dengan nilai AKIP BPOM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
- b. FGD Penyusunan Laporan Kinerja.
- c. Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III tahun 2022.
- d. Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II, III Tahun 2022.

- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan TW III Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- h. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
- i. Penyusunan Matriks Peran hasil.
- j. Workshop Perencanaan bagi JFT Perencana BPOM
- k. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

**Sasaran 10**                      **Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal**

**IKU**  
**Indeks Profesionalitas ASN di Sektama**

**Tabel 20. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	83,41	80,6	84,33	104,63	Memenuhi ekspektasi	102,09	
<b>Capaian SS 10</b>				<b>104,63</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal**” tahun 2022 adalah 104,63% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

### 10.1. INDEKS PROFESIONALITAS ASN SEKRETARIAT UTAMA

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	82,6	77,37	81,05	80,6	80,70	100,12	Memenuhi ekspektasi	97,70	

Realisasi indikator “Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama” tahun 2022 adalah 80,70 dari target 80,6 sehingga capaian indikator adalah 100,12% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan dari tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 77,37, terdapat peningkatan sebesar 4,30%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 80,70, terdapat penurunan sebesar -0,43%. Penurunan ini disebabkan beberapa pegawai belum memenuhi persyaratan diklat minimal 20 JP. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024), capaian indikator adalah 97,70% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

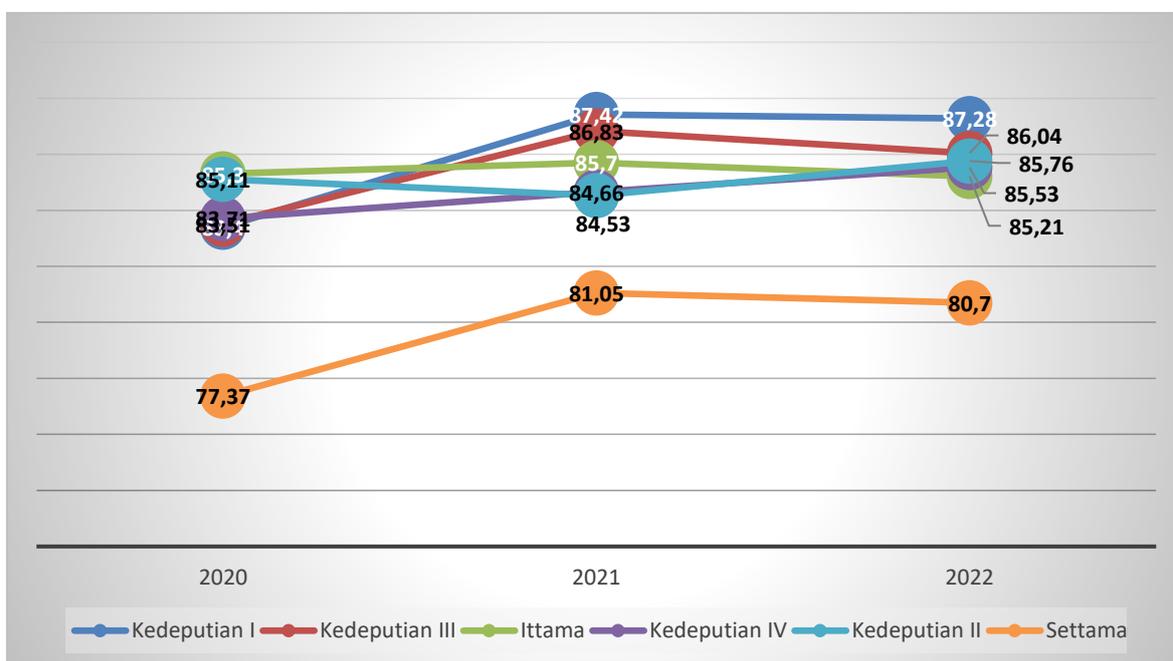
Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama sebesar 80,70 dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja/Satker	Total IP	Jumlah Orang	IP
1	Biro Kerja Sama dan Humas	3057,60	39	78,40
2	Biro Perencanaan dan keuangan	4706,24	56	84,04
3	Biro Hukum dan Organisasi	3900,06	47	82,98
4	Biro SDM	3970,96	49	81,04
5	Biro Umum	5750,54	74	77,71
6	<b>Settama</b>	<b>21385,40</b>	<b>265</b>	<b>80,70</b>

Pencapaian ini didukung dengan pendampingan penyusunan dan penilaian kinerja individu pegawai setiap triwulannya. Selain itu, telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku kepada setiap pegawai di lingkungan Sekretariat Utama.

Perbandingan nilai IP ASN Settama dengan IP ASN BPOM dan unit Eselo I lain di BPOM sebagaimana gambar berikut:



Gambar 27. Perbandingan Nilai IP-ASN Settama dengan BPOM dan Unit Eselon I

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa IP ASN Settama berada di posisi paling bawah. Hal ini disebabkan masih banyak SDM di Settama dengan latar belakang pendidikan non sarjana dibandingkan unit Eselon I lain di BPOM.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
  - 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
  - 2) Sedang dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
  - 3) Penyelenggaraan *Training of Trainer Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)* Tahun 2022;
  - 4) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada [siasn.pom.go.id](http://siasn.pom.go.id)
  - 5) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
  - 6) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I dan II
  - 7) Menyusun SKP tahun 2022
  - 8) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: *e-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
  - 9) Penyelenggaraan *Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Coaching* Pimpinan Tahun 2022;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan
  - 1) Menyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
  - 2) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
  - 3) Melakukan Penilaian SKP TW IV tahun 2021 dan triwulan I, II tahun 2022
  - 4) Penyusunan Sasaran Kinerja Individu melalui SIMAKIN Tahun 2022
  - 5) Melaksanakan Monev SKP TW I, II Tahun 2022
  - 6) FGD Untuk Jabatan Fungsional Perencanaan.
  - 7) FGD Untuk Analisis Kebijakan.
  - 8) Monev pemenuhan Jumlah Jam Pelajaran Diklat Pegawai
  - 9) Mengikuti pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal yang diadakan oleh PPSDM
- c. Biro Hukum dan Organisasi
  - 1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan

- 2) Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
  - 3) Mendorong pegawai untk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
- d. Biro SDM
- 1) Kualifikasi: dilakukan monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
  - 2) Kompetensi: melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.
  - 3) Kinerja: telah dilakukan penyusunan indikator kinerja individu, penilaian dan monev kinerja individu triwulan I, II, III Tahun 2022.
  - 4) Disiplin: Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 dengan jumlah hukuman tingkat ringan sebanyak 14 orang pegawai, hukuman tingkat sedang sebanyak 8 orang pegawai dan hukuman tingkat berat sebanyak 7 orang pegawai.  
Pelanggarannya meliputi kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja, nama baik dan citra BPOM, menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS, Kewajiban melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan, dan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- e. Biro Umum
- 1) Mengikuti pelatihan fungsional sesuai JFT masing-masing pegawai, di antaranya pelatihan TKDN untuk PPBJ, pelatihan jabatan fungsional PK APBN, beberapa kegiatan kursus dan pelatihan dalam negeri lainnya; serta melaksanakan diseminasi

- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Biro Umum
- 3) Mengikuti pelatihan-pelatihan pada platform PPSDM yaitu Ber-AKHLAK-IDEAS
- 4) Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengelolaan Kearsipatelah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
- 5) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
- 6) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I, II, III Tahun 2022

**Sasaran 11** **Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**

**IKU**  
**Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal**

**Tabel 21. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022			Capaian terhadap Target 2024		
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,25	2,45	108,89	Memenuhi ekspektasi	81,67	
<b>Capaian SS 11</b>				<b>108,89</b>			Memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**” pada tahun 2022 adalah 108,89 dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dengan demikian, sasaran strategi berhasil tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

### 11.1. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI SEKTAMA YANG OPTIMAL

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal	3	0,20	1,20	2,25	2,45	108,89	Memenuhi ekspektasi	81,67	

Realisasi indikator “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Settama yang Optimal” tahun 2022 sebesar 2,45 (Sangat Optimal) dari target sebesar 2,25, sehingga capaian indikator adalah 108,89% dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar 0,20, terdapat peningkatan sebesar 1.125%. dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 1,20, terdapat peningkatan sebesar 104,17%. Peningkatan ini karena telah meningkatnya kepatuhan pegawai di Biro-Biro untuk menggunakan *email corporate* dan melakukan pemutakhiran data di BoC secara berkala. Dibandingkan target akhir periode Renstra (2024) sebesar 3, maka capaian indikator adalah 81,67% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC
  - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
  - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
  - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
  - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
  - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus

dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

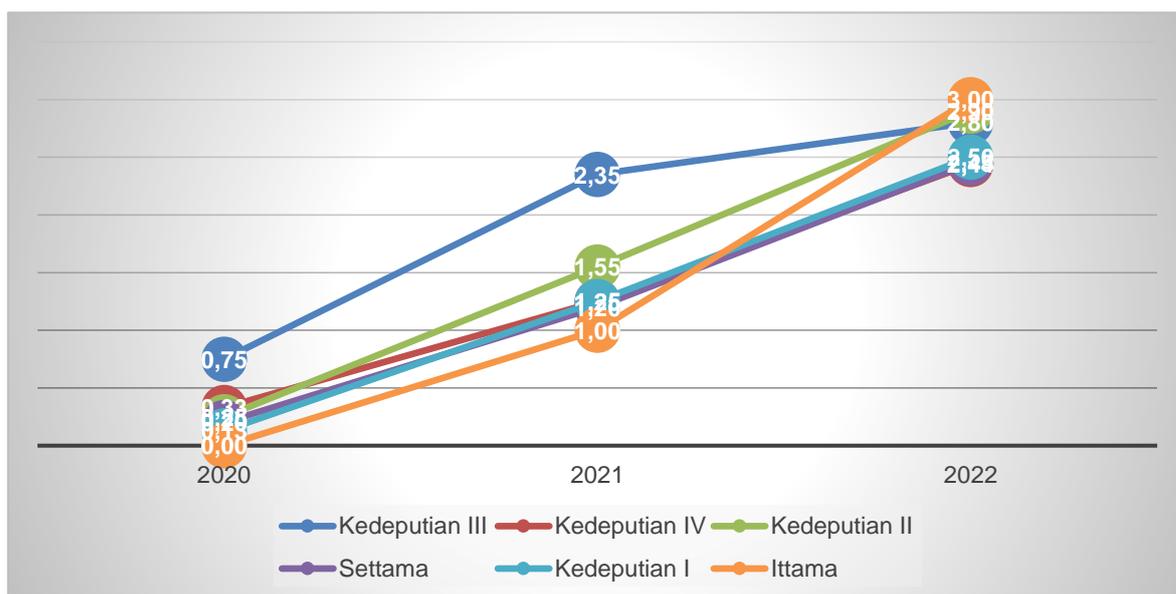
Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

**Tabel 22. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama**

Unit Kerja	Pemanfaatan Sistem Informasi		Data dan Informasi mutakhir	Total Indeks
	email	pemutakhiran BOC	pemutakhiran BOC	
Biro Kerjasama dan Humas	2	2	3	2,5
Biro Perencanaan dan Keuangan	2	3	3	2,75
Biro Hukum dan Organisasi	3	2	2	2,25
Biro SDM	3	2	2	2,25
Biro Umum	3	3	2	2,5
<b>Settama (rata-rata indeks)</b>				<b>2,45 (sangat optimal)</b>

Beberapa hal yang mendukung pencapaian target adalah: 1) meningkatnya pemanfaatan email pribadi setiap pegawai dan email unit; 2) pemanfaatan dan pemutakhiran data BOC akun Eselon II dengan lebih optimal; 3) pelaksanaan verifikasi/pemutakhiran data pada BOC secara berkala.

Perbandingan indeks pengelolaan data dan informasi Settama dan unit Eselon I lain di BPOM sebagai berikut:



Gambar 28. Perbandingan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Settama dan Unit Eselon I Lain Tahun 2020-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa indeks pengelolaan data dan informasi (IPDI) unit Eselon I secara umum mengalami tren peningkatan selama tahun 2020-2022. IPDI Sekretariat Utama pada tahun 2022 berada di peringkat ke-5 dari 6 unit Eselon I di BPOM. Hal ini perlu menjadi perhatian agar Settama dapat lebih meningkatkan kinerjanya ke depan, utamanya Biro-Biro dengan indeks kurang dari 2,5.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- b. Mengotimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
- c. Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC)
- d. Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi

**Sasaran 12****Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel****IKU****1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama****Tabel 23. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	93,6	90,70	96,90	Belum memenuhi ekspektasi	95,68	▲
<b>Capaian SS 12</b>				<b>96,90</b>			Belum memenuhi ekspektasi		

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**” tahun 2022 adalah 96,90% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Dengan demikian, sasaran strategi belum tercapai dengan program/kegiatan yang telah dilaksanakan dan anggaran belum digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

**12.1. NILAI KINERJA ANGGARAN SEKTAMA**

Indikator	Target	Realisasi		Capaian 2022				Capaian terhadap Target 2024	
	2024	2020	2021	T	R	%	Kriteria	%	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	94,8	91,47	88,75	93,6	90,70	96,90	Belum memenuhi ekspektasi	95,68	▲

Realisasi indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sektama” tahun 2022 adalah 90,70 dari target tahun 2022 sebesar 93,6, sehingga capaian indikator adalah 96,90% dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” (Kuning). Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah masih rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA (nilai IKPA) dan beberapa indikator program yang tidak tercapai targetnya yang mengakibatkan nilai efisiensi rendah (nilai EKA). Indikator ini merupakan lanjutan tahun 2020-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar 91,47, terdapat penurunan sebesar -0,84%. Dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 88,75, terdapat peningkatan sebesar 2,20%. Peningkatan ini disebabkan semakin meningkatnya kepatuhan satker dalam pelaksanaan anggaran sehingga dapat meningkatkan nilai IKPA. Dibandingkan dengan target akhir periode Renstra (2024)

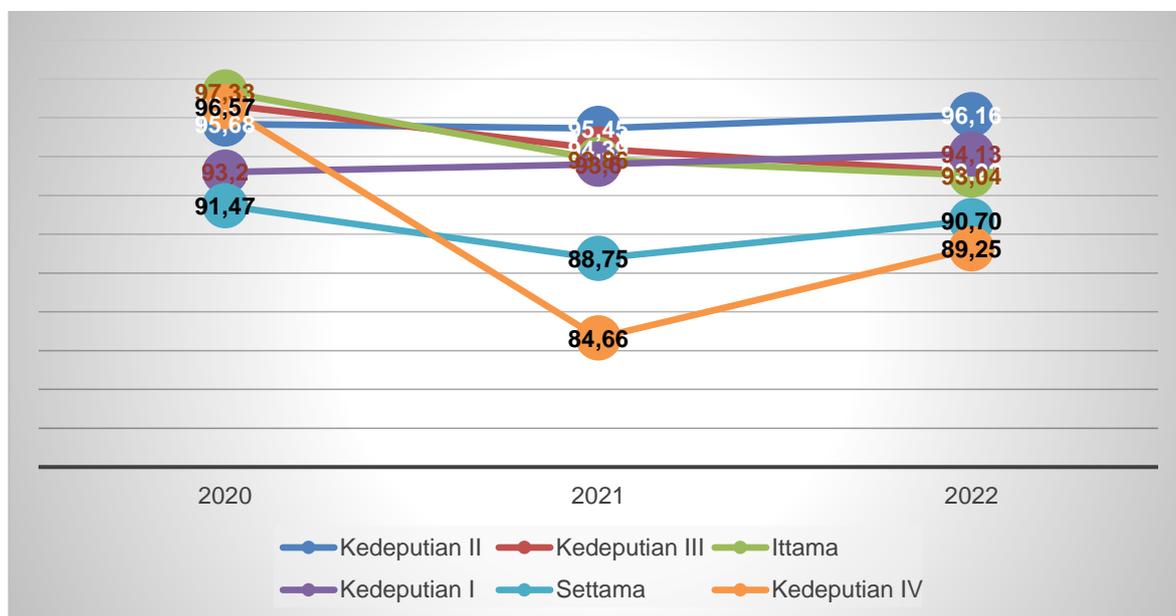
sebesar 94,8, capaian indikator adalah 95,68% dengan kriteria “Akan Tercapai” (Kuning).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kinerja Anggaran Sektama} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (86,73 \times 60\%) + (96,66 \times 40\%) \\ &= 90,70 \end{aligned}$$

Berdasarkan data per 15 Januari 2023, diperoleh Nilai EKA (aplikasi SMART) adalah 86,73, sedangkan nilai IKPA (aplikasi OMPSAN) adalah 96,66, sehingga nilai kinerja anggaran tahun 2022 adalah 90,70 atau 96,90% dari target tahun 2022 sebesar 93,6.

Perbandingan NKA Sektama dengan NKA unit Eselon I lain sebagai berikut:



Gambar 29. Perbandingan NKA Settama dan Unit Eselon I Lain Tahun 2020-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa NKA Settama berada di posisi ke-5 dari 6 unit Eselon I di BPOM. Hal ini disebabkan Settama memiliki beberapa indikator yang masih

belum terdapat realisasinya di tahun 2022 karena menunggu nilai dari K/L lain sehingga menggunakan realisasi tahun 2021 padahal target tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal ini berdampak pada rendahnya nilai EKA Settama. Selain itu, jumlah anggaran yang besar yang dikelola Settama, mengakibatkan nilai IKPA juga perlu lebih ditingkatkan ke depan.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.
- c. Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
- d. Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.
- e. Koordinasi Optimalisasi Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Penyerapan Anggaran Satker Sekretariat Utama
- f. Koordinasi Penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satker Sekretariat Utama.

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
- b. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
- c. Menetapkan metode perhitungan capaian output.
- d. Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
- e. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, secara berkala sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- f. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja memenuhi target yang ditetapkan, mengacu pada SE Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- g. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
- h. Penerapan *reward* dan *punishment* untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Utama

## II. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN III TAHUN 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan kegiatan di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan realisasi anggaran	Kegiatan di Biro KSH telah terlaksana secara optimal sehingga realisasi anggaran mencapai 99,41%		
2	Peningkatan realisasi indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen	Telah dilakukan upaya perbaikan layanan internal di Kesettamaan agar indeks tahun 2023 dapat meningkat		
3	Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus	Terdapat peningkatan NKA BPOM dan Settama dibandingkan tahun 2021		
4	Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB		Sedang proses penelaahan oleh KemenpanRB	
5	Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT		Koordinasi jadwal secara berkala	
6	Pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan rencana di tahun 2022.	Aplikasi simetris telah dikembangkan sesuai rencana tahun 2022	Pengembangan lanjutan di 2023	
7	Percepatan persiapan Pengadaan Seleksi PPPK TA 2022	Pengumuman seleksi PPPK telah dilaksanakan di bulan Desember		

### III. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI INSPEKTORAT UTAMA ATAS HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2021

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>PERENCANAAN</b>							
1.Melakukan reuiu kembali atas pemetaan tujuan dan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan, sehingga masing-masing sasaran spesifik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Telah dilakukan reuiu terhadap pemetaan tujuan hingga sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen Reuiu Renstra 2020-2024		Data dukung berupa Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.12.21.305 tentang Reuiu Renstra Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024 yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2021 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1154hPMohzf2sq5M-gKVZxBD3dxSEpFVh">https://drive.google.com/drive/folders/1154hPMohzf2sq5M-gKVZxBD3dxSEpFVh</a>				
2.Penetapan target kinerja agar mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dan menyusun kertas kerja penetapan target berdasarkan basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapannya;		Penetapan target indikator kinerja Sekretariat Utama telah dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja tahun2 sebelumnya namun belum diformalkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Akan dilakukan penyusunan dokumen kertas kerja penetapan target indikator kinerja sekretariat utama. Telah dilakukan permintaan data kertas kerja ke Biro terkait melalui Permintaan Penyampaian	Surat Permintaan Penyampaian Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 ke Biro2 tanggal 18 Juli 2022 dengan Nomor B-PR.01.02.21.211.07.22.223 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Mdp_cGUZMiqMBhlibNDPI_ilyRSSWmwr">https://drive.google.com/drive/folders/1Mdp_cGUZMiqMBhlibNDPI_ilyRSSWmwr</a>			Akan dilakukan penyusunan dokumen dan sosialisasi/distribusi kertas kerja penetapan target indikator kinerja sekretariat utama ke seluruh Biro.	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
		Kertas Kerja Penetapan Target Indikator Sekretariat Utama Tahun 2020-2024					
3.Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan.	Telah dilakukan pemetaan alokasi anggaran per subkomponen per indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Sekretariat Utama Tahun 2021	-	Data dukung berupa dokumen PK, RAPK dan detail subkomponen RAPK Sekretariat Utama tahun 2021 telah diupload ke <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Qhwdlp8Eu4Naz-L7n0V5Y0gLvmck5rPc">https://drive.google.com/drive/folders/1Qhwdlp8Eu4Naz-L7n0V5Y0gLvmck5rPc</a>	-	-	-	-
4.Menyusun mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan punishment dengan memanfaatkan target kinerja yang telah disusun dan diukur capaiannya secara berkala.	Telah disusun mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) melalui SK Kepala Badan POM tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM, serta telah dilakukan pelaporan hasil perhitungan capaian kinerja per tahun anggaran yang ditetapkan melalui SK Kepala Badan POM tentang Penetapan Satuan Kerja yang Diberikan		1. SK Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.10.20.445 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan <a href="https://drive.google.com/file/d/1xzaNSEj9RvKvrpSolFC78T93eS4QUnMR/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1xzaNSEj9RvKvrpSolFC78T93eS4QUnMR/view?usp=sharing</a> 2. Laporan Penilaian Kinerja Anggaran untuk	Menerbitkan SK Kepala Badan POM SK Kepala Badan POM Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Kerja yang Diberikan Penghargaan Atas Kinerja Anggaran TA 2021, termasuk penilaian		akan didiskusikan bersama tools dalam pengukuran reward and punishment di Settama	Pembuatan SK Reward and punishment di Settama

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
	Penghargaan Atas Kinerja Anggaran		Penghitungan Penghargaan dan Sanksi TA 2021 <a href="https://drive.google.com/file/d/1srtaXaseRfdf5P1XO55jKdDOGSbElx36/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1srtaXaseRfdf5P1XO55jKdDOGSbElx36/view?usp=sharing</a> 3. SK Kepala Badan POM Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Kerja yang Diberikan Penghargaan Atas Kinerja Anggaran TA 2021 <a href="https://drive.google.com/file/d/1lMaLeMrb4aNY6NVq8AEqQWRvrSLKn6jk/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1lMaLeMrb4aNY6NVq8AEqQWRvrSLKn6jk/view?usp=sharing</a>	satker sektama di dalam nya			
<b>PENGUKURAN</b>							
1. Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai tingkat individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja individu sampai level kinerja unit serta <b>memanfaatkan hasil</b> pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar	Telah dilakukan penjabaran indikator kinerja unit kerja sampai ke level individu melalui aplikasi SIMAKIN dan integrasi sasaran, indikator dan target aplikasi SIMETRIS dan SIMAKIN		1. Pemetaan indikator Settama sampai individu <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1RFMJWau2GzhtTer3X5sfGktzhdH-8WkE">https://drive.google.com/drive/folders/1RFMJWau2GzhtTer3X5sfGktzhdH-8WkE</a>				

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
pemberian reward and punishment;							
2.Menyempurnakan pemanfaatan aplikasi e-performance untuk pengukuran capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.	telah dilakukan pelaporan per bulan melalui aplikasi e-performance pada level Settama dan level biro-biro. pelaporan telah dilakukan tepat waktu dan sesuai standar. data yang dilaporkan pada aplikasi e-perfromance juga telah dibahas capaiannya pada saat pelaksanaan rapat evaluasi internal settama dan dilaporkan dalam laporan kinerja interim settama (termasuk didalamnya capaian kinerja biro-biro)		1. SS pelaporan melalui aplikasi e-performance 2. Laporan evaluasi internal TW 1 dan 2 tahun 2022 3. Laporan kinerja interimTW 1 dan 2 tahun 2022 <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11Qjw9qSFXyiOynG9LwkO_xp7jsepBzEy">https://drive.google.com/drive/folders/11Qjw9qSFXyiOynG9LwkO_xp7jsepBzEy</a>				
<b>PELAPORAN</b>							
1.Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan	1. Laporan Kinerja tahun 2020 dan Lapkin interim TW I - III 2021 telah dimanfaatkan untuk penyusunan revisi Renstra Settama 2020-2024, antara lain: a. mereviu target tahun 2021-2024 b. mereviu nomenklatur	Akan dilakukan pembahasan indikator dan target guna penyusunan PK dan RAPK tahun 2023 setelah Rapat Internal TW 3 (Lapkin interim TW 3) tahun 2022 sebelum penetapan PK dan RAPK dengan mempertimbangkan hasil	Data dukung berupa : 1. Kertas kerja indikator kinerja Reviu Renstra 2020-2024 2. Lapkin interim Settama TW III-IV 2021 3. Lapkin Tahun settama 2021 telah diupload ke	-	-		Akan dilakukan pembahasan indikator dan target guna penyusunan PK dan RAPK tahun 2023 setelah Rapat Internal TW 3 (Lapkin interim TW 3) tahun 2022 sebelum penetapan PK dan

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	indikator c. mereviu sasaran dan indikator karena adanya perubahan organisasi di Kesettamaan 2. Lapkin TW IV 2021 dan lapkin tahun 2021 sudah disesuaikan baik dari sasaran, indikator maupun target berdasarkan revisi Renstra Settama 2020-2024	evaluasi internal TW 1-3 (Lapkin interim TW 1-3) tahun 2022.	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ajl5gH5zl47s7IgzrAdxl1m6N7F_tHiG">https://drive.google.com/drive/folders/1ajl5gH5zl47s7IgzrAdxl1m6N7F_tHiG</a>				RAPK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi internal TW 1-3 (Lapkin interim TW 1-3) tahun 2022.
2.Menyempurnakan penyajian efisiensi sumber daya pada laporan kinerja yang memuat analisis penggunaan sumber daya pada level sasaran.	Analisis efisiensi per sasaran sudah dibahas pada laporan kinerja tahun 2021, tetapi hanya membahas untuk sasaran yang tidak efisien saja		Data dukung : Lapkin Settama Tahun 2021  telah diupload ke <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1IEykKqDpxhKZJlgYojEzatHik83WiukM">https://drive.google.com/drive/folders/1IEykKqDpxhKZJlgYojEzatHik83WiukM</a>				Akan dibuat analisis penggunaan sumber daya per sasaran pada laporan kinerja tahunan, baik sasaran yang sudah efisien maupun yang belum efisien
<b>EVALUASI INTERNAL</b>							
Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja, pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.	Telah memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan tahun mendatang. perbaikan dilakukan dengan melakukan reviu terhadap IKU dan target IKU yang capaiannya telah melebihi target baik target tahunan maupun target akhir periode renstra. Adapun pembahasan dilakukan pada		Data dukung berupa : 1. Lapkin Settama 2020 2. Kertas kerja indikator kinerja Reviu Renstra 2020-2024 3. Paparan plt Sestama pada Rakernas telah diupload ke <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1AmZYLFMbDo">https://drive.google.com/drive/folders/1AmZYLFMbDo</a>				

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
	forum: 1. Rapat evaluasi internal di lingkungan Settama 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM, khususnya lingkup Sekretariat Utama.		<a href="#">GCKxKFTfxWhD1IjHDAcZfJ</a>				
<b>CAPAIAN KINERJA</b>							
1.Meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur.	pelaporan data capaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Pedoman Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Data kinerja dilaporkan per bulan melalui aplikasi monev BOC, aplikasi SMART, aplikasi e-monev Bappenas, dan aplikasi Simetris. selain itu, secara berkala dilakukan rapat evaluasi internal lingkup Settama per triwulan . pengukuran kinerja mengacu pada manual IKU yang terdapat pada aplikasi SIMETRIS sehingga dipastikan formulasinya valid dan dapat diakses dengan						

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Data Dukung Tindak Lanjut	RATL TAHUN 2022			
	Sudah	Belum		TW I	TW II	TW III	TW IV
	mudah oleh semua pengguna.						
2.Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas rencana aksi dan menindaklanjuti hasil evaluasi internal untuk perbaikan kinerja dan perencanaan kinerja.		Akan dilakukan pembahasan indikator dan target guna penyusunan PK dan RAPK tahun 2023 setelah Rapat Internal TW 3 (Lapkin interim TW 3) tahun 2022 sebelum penetapan PK dan RAPK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi internal TW 1-3 (Lapkin interim TW 1-3) tahun 2022.					Akan dilakukan pembahasan indikator dan target guna penyusunan PK dan RAPK tahun 2023 setelah Rapat Internal TW 3 (Lapkin interim TW 3) tahun 2022 sebelum penetapan PK dan RAPK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi internal TW 1-3 (Lapkin interim TW 1-3) tahun 2022.

#### IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022, telah dilakukan pencadangan anggaran/ *automatic adjustment* (AA) Tahap I dan Tahap II di Sekretariat Utama sebesar Rp39.256.361.000,00 sehingga total pagu setelah dikurangi AA adalah Rp359.715.627.000,00.

Sumber anggaran yang dilakukan pencadangan anggaran/AA adalah:

- a. sisa anggaran belanja per 25 Mei 2022 yang belum terserap, di luar alokasi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Kegiatan yang bersumber dari PNBPN, dan Belanja barang yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di Bulan Juni – Desember 2022 meliputi: a) Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OB/OK), b) Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll, c) Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota) termasuk perjalanan dinas luar negeri, d) Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota), e) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, f) Belanja jasa lainnya;
- b. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dari belanja barang dan modal;
- c. Kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 baik itu pelaksanaan swakelola maupun modal.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-262/MK.2/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 tentang revisi pembukaan blokir pencadangan/*automatic adjustment* anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022 dan surat Dirjen Anggaran Nomor S-564/AG/AG.4/2022 tanggal 4 Desember 2022 hal Pengesahan Revisi Realokasi Anggaran BPOM TA 2022 yang Terblokir ke BA BUN, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00.

Pada tahun 2022<sup>11</sup> telah direalisasikan sejumlah Rp365.812.917.814,00 **(98,60%)**. Rincian realisasi per program dan per sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 24. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022**

Program/Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>A. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>370.989.800.000</b>	<b>365.812.917.814</b>	<b>98,60</b>
1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	15.481.897.360	15.458.501.830	99,85
2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	127.350.004.600	127.186.023.740	99,87
3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	7.592.966.740	7.591.354.595	99,98
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	195.198.826.250	190.285.093.630	97,48
5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	1.503.540.000	1.502.953.958	99,96
6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	4.524.406.000	4.466.434.106	98,72
7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	7.157.677.000	7.154.611.910	99,96
8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama	3.020.826.000	3.020.428.186	99,99
9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	3.579.741.470	3.574.157.218	99,84
10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	2.312.143.400	2.310.027.169	99,91
11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	2.256.300.430	2.253.844.408	99,89

<sup>11</sup> berdasarkan aplikasi OMSPAN per 11 Januari 2023

Program/Sasaran Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	1.011.470.750	1.009.487.064	99,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” yaitu sebesar 52,51% dari total pagu Sekretariat Utama sebesar Rp370.989.800.000,00. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Upaya yang telah dilakukan sehingga realisasi anggaran dapat optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
  - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
  - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
  - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

## V. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

### A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan

*input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$\text{IE} = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} \text{SE} &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

**Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien**

**Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien**

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{TE} = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 25. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022**

NO	SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAIAN TE	KATEGORI
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM	98,74	99,85	0,99	-0,01	-	Tidak Efisien
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	103,27	99,87	1,03	0,03	100%	Efisien
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	100,00	99,98	1,00	0,00	100%	Efisien
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	111,30	97,48	1,14	0,14	100%	Efisien
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	100,00	99,96	1,00	0,00	100%	Efisien
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	100,59	98,72	1,02	0,02	100%	Efisien
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	104,91	99,96	1,05	0,05	100%	Efisien
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	102,72	99,99	1,03	0,03	100%	Efisien
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	102,50	99,84	1,03	0,03	100%	Efisien
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	100,12	99,91	1,00	0,00	100%	Efisien
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat	108,89	99,89	1,09	0,09	100%	Efisien

NO	SASARAN	OUTPUT	INPUT	IE	TE	CAPAIAN TE	KATEGORI
	dan Makanan di Sekretariat Utama						
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	96,90	99,80	0,97	-0,03	-	Tidak Efisien
	Total	<b>102,12</b>	<b>98,60</b>	<b>1,04</b>	<b>0,04</b>	<b>100%</b>	<b>Efisien</b>

Berdasarkan perhitungan efisiensi tahun 2022, secara umum Sekretariat Utama telah menggunakan sumber daya secara efisien. Dari 12 (dua belas) sasaran strategis/program di Sekretariat Utama, terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan kategori “Tidak Efisien” dan 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan kategori “Efisien”. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi dan penjelasan atas penyebab tidak efisiennya penggunaan sumber daya sebagai berikut:

1. Kategori Tidak Efisien (SS-1 dan SS-12)
  - a. Terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai targetnya, yaitu Nilai Kinerja Anggaran BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran Settama. Hal ini disebabkan rendahnya nilai efisiensi (komponen EKA) karena tingginya realisasi anggaran namun dengan capaian output yang kurang optimal.
  - b. Terdapat indikator sasaran strategis yang belum ada realisasinya karena menunggu nilai dari KemenPANRB sehingga menggunakan realisasi tahun 2021 yaitu Nilai RB BPOM di lingkup Settama dan Nilai AKIP BPOM di lingkup Settama. Hal ini menyebabkan target 2022 tidak tercapai.
2. Kategori Efisien (SS-2 s.d. SS-11)
  - a. Seluruh indikator sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.
  - b. Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode *hybrid* (kombinasi daring dan luring), sehingga sisa anggaran dapat dioptimalisasi untuk kegiatan strategis lainnya.
  - c. Membatasi kegiatan di luar kantor sesuai dengan urgensinya.
  - d. Melakukan optimalisasi sisa anggaran pada kegiatan yang telah tercapai outputnya untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi sehingga capaian kinerja meningkat.

Capaian output (realisasi kinerja) 102,12% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 98,60% menunjukkan **Efisiensi** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

## B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

# BAB / V

## PENUTUP

### I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama tahun 2022, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022, dilakukan pengukuran terhadap 26 (dua puluh enam) indikator kinerja karena 1 (satu) indikator kinerja lainnya yaitu “Indeks Pengelolaan Aset” masih menunggu penilaian dari Kementerian Keuangan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target tahun 2022 dengan realisasi tahun 2022. Dari 26 (dua puluh enam) indikator tersebut, terdapat 19 (sembilan belas) indikator dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau), serta 7 (tujuh) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi (Kuning)”.
2. 7 (tujuh) indikator yang belum memenuhi ekspektasi yaitu 1) Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen; 2) Indeks kepuasan media; 3) Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media; 4) Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama; 5) Nilai AKIP Settama; 6) Nilai RB BPOM di Lingkup Settama; dan 7) Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama. Perlu dilakukan upaya khusus agar target kinerja di tahun 2023-2024 dapat tercapai. Nilai RB BPOM di Lingkup Settama dan Nilai AKIP BPOM di Lingkup Settama masih menggunakan realisasi tahun 2021 karena nilai 2022 belum diterbitkan oleh KemenPANRB.
3. Dibandingkan target akhir periode Renstra yaitu tahun 2024, terdapat 13 (tiga belas) indikator dengan kriteria “Tercapai/Melampaui” ( $\geq 100\%$ ), dimana 8 (delapan) diantaranya capaiannya telah melebihi 100%. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan target 2024.
4. Pada tahun 2022 telah direalisasikan sejumlah Rp365.812.917.814,00 (**98,60%**) dari pagu Rp370.989.800.000,00. Anggaran telah digunakan secara efisien dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,04 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,04.

## II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan kinerja tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan menjadi fokus perbaikan kinerja ke depan. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

5. Penyusunan rencana penarikan dana secara cermat sehingga Deviasi Halaman III DIPA dapat diminimalkan.
6. Perbaikan pelayanan internal Sekretariat Utama sehingga Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen dapat meningkat.
7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
8. Penyusunan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi di lingkup Sekretariat Utama.



# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024**

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	41	43,25	46,39	47,21	47,86
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,25	76,73	81,08	81,93	82,8
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	94	95	96	97
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	79,5	83	86	89	92
	Indeks Kepuasan Media	73	73,5	74	74,5	75
	Indeks Opini Publik BPOM	66	67	68	69	70
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,70	3,73	3,75	3,78	3,81
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	80	82	84	86	88
	Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal	78	80	82	84	86
	Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal	81	83	84	85	87
Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	82	83	84	85	86
Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	82	84	86	88	90
Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,59	99,6	99,61	99,62	99,63
	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama	88,98	90,76	92,58	94,43	96,32
	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama	3,91	4,06	4,21	4,36	4,51
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	85	89	93	94	95
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	81	85	90	91	92
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	78	79	80	81	82
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	1,51	2	2,26	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93	94	95	96	97
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	Efisien (100%)				

## Lampiran 2

## REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	40,35	32,03	33,21	34,4	35,58
	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	70,67	72,44	73,33	74,22	75,14
	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,37	93	93,5	94,5	95,6
Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	85,3	87	88	89	90
	Indeks Kepuasan Media	74,02	74	74,5	75	75,5
	Indeks Opini Publik BPOM	79,6	78	79	80	81
	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,8	3,70	3,72	3,75	3,78
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	79	80	-	-	-
	Indeks Pengelolaan Aset	-	-	2,93	2,95	2,98
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	56	72	74	80
	Indeks Sistem Merit	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,88)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,89)	Lev. 4 (0,90)

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	100	100	100	100
	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	79	100	100	100	100
Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	100	100	100	100
	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	96,43	95,5	95,75	96	96,5
Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerjasama yang efektif	91,67	84	86	88	90
	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	99,82	99,84	99,85	99,86
	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	53,17	65	66	67	68
Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,47	99,2	99,4	99,6	99,8
	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan di lingkup Sekretariat Utama	91	92,52	94,37	96,26	98,19
	Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sektama	4,48	4,51	4,55	4,60	4,65
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	73,75	79,5	81,5	83,5	85,5
	Nilai AKIP Sekretariat Utama	80,69	83	85,3	87,6	89,9
Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	77,37	79,6	80,6	81,6	82,6
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik	0,2	2	2,25	2,5	3

Sasaran Program	Indikator	Realisasi 2020	Target Kinerja			
			2021	2022	2023	2024
Obat dan Makanan di Sekretariat Utama						
Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	91,47	93	93,6	94,2	94,8
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama	75	Efisien (100%)	-	-	-

## Lampiran 3

## RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022



### BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

-4-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.2.21.12.21.303 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

#### RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33,21
		Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73,33
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
		Indeks Kepuasan Media	74,5
		Indeks Opini Publik BPOM	79
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3,72
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	Nilai Pengelolaan BMN	82
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,89)
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100
		Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95,75



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244753, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94,37
		Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4,55
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81,5
		Nilai AKIP Sekretariat Utama	85,3
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80,6
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2,25
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93,6

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA

## Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
SEKRETARIAT UTAMA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menguatnya pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama	2.25
2	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88
3	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Kepuasan Media	74.5
4	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks Opini Publik BPOM	79
5	Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	3.72
6	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	86
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.84
8	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	33.21
10	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	73.33
11	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	4
12	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93.5
13	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.4
14	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	94.37
15	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	4.55
16	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	100
17	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Pengelolaan Aset	2.93
18	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	72
19	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM	Indeks Sistem Merit	0.89
20	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100
21	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	93.6
22			100
23	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	Persentase Advokasi Hukum yang efektif	95.75
24	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	80.6
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Indeks RB Sekretariat Utama	81.5
26	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	Nilai AKIP Sekretariat Utama	85.3
27	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100

Program :  
Dukungan Manajemen

Anggaran :  
Rp.  
398,971,988,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 3 Januari 2022  
Pihak Pertama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma  
Dewa, S.Si., Apt., MPPM.



## RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

 SEKRETARIAT UTAMA  
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
1.	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	768.076.270,00
2.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi											88	2.316.560.000,00	
3.	Indeks Kepuasan Media											74.5	4.211.460.000,00	
4.	Indeks Opini Publik BPOM											79	1.741.780.000,00	
5.	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen			3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72	152.850.370.200,00	
6.	Persentase kerja sama yang efektif			20	20	20	40	40	40	70	70	70	86	6.627.503.000,00
7.	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media			99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	99.84	1.316.410.000,00
8.	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti			50	50	50	55	55	55	60	60	60	66	346.080.000,00
9.	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama												33.21	13.133.935.010,00
10.	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama												73.33	1.026.730.000,00

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran		
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12	
11.	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM												4	1.078.229.000,00	
12.	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	50	60	65	70	75	80	84	85	87	88	93.5		1.370.497.500,00	
13.	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti			99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4		1.382.918.000,00
14.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama			94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37	94.37		2.387.970.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama												4.55	215.978.000,00	
16.	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	2	10	15	20	30	40	45	49	54	60	75	100		10.090.500.790,00
17.	Indeks Pengelolaan Aset												2.93	3.968.154.000,00	
18.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa												72	2.540.164.000,00	
19.	Indeks Sistem Merit												0.89	176.854.023.850,00	
20.	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan												100	566.995.200,00	

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
21.	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	50	50	50	50	75	75	75	85	85	85	93.6	1.471.206.550,00	
22.	Persentase penurunan perundang-undangan yang diselesaikan			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	2.925.833.000,00
23.	Persentase Advokasi Hukum yang efektif			95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	95.75	1.849.890.000,00
24.	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama											80.6	2.701.472.100,00	
25.	Indeks RB Sekretariat Utama											81.5	3.004.648.030,00	
26.	Nilai AKJP Sekretariat Utama											85.3	1.251.091.500,00	
27.	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015											100	973.512.000,00	
Total												398.971.988.000,00		

Jakarta, 3 Januari 2022

Pit. Sekretaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM.



## Lampiran 6.

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM	1	Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama	11.940.409.260	11.919.589.712	99,83%
		2	Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama	847.853.100	846.649.897	99,86%
		3	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	1.266.484.000	1.266.189.582	99,98%
		4	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	1.427.151.000	1.426.072.639	99,92%
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	4.104.471.000	4.053.611.270	98,76%
		6	Indeks Kepuasan Media	2.718.746.000	2.677.404.633	98,48%
		7	Indeks Opini Publik BPOM	1.310.561.000	1.310.272.712	99,98%
		8	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	119.216.226.600	119.144.735.125	99,94%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan	9	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar	7.592.966.740	7.591.354.595	99,98%
4	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM	10	Indeks Pengelolaan Aset	4.350.209.000	4.349.820.802	99,99%
		11	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.466.861.000	3.408.946.372	98,33%
		12	Indeks Sistem Merit	187.381.756.250	182.526.326.456	97,41%
5	Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran	13	Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	703.808.000	703.313.508	99,93%
		14	Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	799.732.000	799.640.450	99,99%
6	Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum	15	Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%)	2.650.311.000	2.640.573.037	99,63%
		16	Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%)	1.874.095.000	1.825.861.069	97,43%

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Pagu	Realisasi	% Realisasi
7	Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif	17	Persentase kerja sama yang efektif (%)	5.031.608.000	5.029.842.560	99,96%
		18	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%)	1.765.455.000	1.764.401.165	99,94%
		19	Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%)	360.614.000	360.368.185	99,93%
8	Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama	20	Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	753.388.000	753.255.969	99,98%
		21	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama	2.105.328.000	2.105.176.517	99,99%
		22	Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama	162.110.000	161.995.700	99,93%
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal	23	Indeks RB Sekretariat Utama	2.474.367.470	2.468.787.909	99,77%
		24	Nilai AKIP Sekretariat Utama	1.105.374.000	1.105.369.309	100,00%
10	Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal	25	Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama	2.312.143.400	2.310.027.169	99,91%
11	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama	26	Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal	2.256.300.430	2.253.844.408	99,89%
12	Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama	1.011.470.750	1.009.487.064	99,80%
<b>TOTAL</b>				<b>370.989.800.000</b>	<b>365.812.917.814</b>	<b>98,60%</b>

## Lampiran 7.

**CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA  
TAHUN 2022**

No	Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
1.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	2,00	100,00%
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	%	87,70	105,66%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	Indeks	87,76	111,80%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	78,40	95,61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100,00	111,11%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	Negara	97,68	97,84%
		Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	86	%	86,59	100,69%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	%	76,67	116,17%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	%	98,58	103,77%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	%	86,68	100,79%
		Indeks kepuasan media	74,5	Indeks	73,55	98,72%

No	Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
		Indeks opini publik BPOM	79	Indeks	84,76	107,29%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3,85	Indeks	3,83	99,48%
1.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	Nilai	4,07	90,85%
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	Nilai	71,86	98,00%
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	Nilai	87,60	92,21%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	Nilai	95,87	100,68%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	100,00	100,00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	Indeks	3,48	91,10%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	%	58,60	82,49%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	88,00	88,00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan	100	%	80,00	80,00%

No	Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
		pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar				
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	%	90,02	107,81%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	Indeks	89,58	119,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	Indeks	84,00	102,44%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100,00	100,00%
1.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,5	Nilai	-	-
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41	Nilai	-	-
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	5,47	Nilai	-	-
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	Nilai	-	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	Indeks	95,17	108,15%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	Indeks	3,75	100,00%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	100,00	100,00%

No	Kegiata	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	100,00	100,00%
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	100,00	100,00%
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00%
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4	%	99,70	100,30%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	%	94,54	100,18%
		Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks	4,90	107,69%
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	Indeks	92,02	106,69%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85	Indeks	82,98	97,62%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	%	95,50	100,00%
1.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	Nilai	5,59	100,00%
		Indeks Sistem Merit	0,89	Indeks	0,94	105,62%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,44	Indeks	3,55	103,20%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	86,58	115,44%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	%	99,80	108,48%

No	Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	Indeks	3,32	108,50%
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72	%	75,53	104,90%
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	80	%	90,00	112,50%
		Indeks RB Biro SDM	83,5	Indeks	94,93	113,69%
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	Indeks	81,04	102,58%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	100,00	100,00%
1.5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	Nilai	98,24	107,96%
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.93	Nilai	-	Menunggu nilai dari Kemenkeu
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	72	Indeks	84,23	116,99%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,75	Indeks	3,60	96,00%
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	100,00	100,00%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	Persen	100	113,64%

No	Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Realisasi 2022	Capaian
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	Persen	-	Masih dalam proses perhitungan
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	Level	85,00	100,00%
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	Persen	-	Masih dalam proses perhitungan
		Indeks RB Biro Umum	83,2	Indeks	86,71	104,22%
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	75	Indeks	77,71	103,61%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	%	100,00	111,11%



Jl. Percetakan Negara  
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



[www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)



@bpom\_ri



Bpom RI

